

LAPORAN PENELITIAN

**MODEL KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN
KAWASAN WISATA KEDUNG OMBO YANG BERKELANJUTAN**



Oleh:

Dr. Dra. Nafiah Ariyani, MSi

Prof. Akhmad Fauzi, MSc, Ph.D

Ir. Farhat Umar, MSi

UNIVERSITAS SAHID

JAKARTA

2020

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR	4
I. LATAR BELAKANG.....	5
II. TUJUAN PENELITIAN	11
III. MANFAAT PENELITIAN	11
IV. LANDASAN TEORI.....	12
4.1. Konsep Kelembagaan	12
IV.2. Konsep Pengembangan Wisata yang Berkelanjutan	13
IV.3. Konsep Kebijakan Pengembangan Pariwisata Terpadu	14
V. METODE PENELITIAN.....	16
a. Sifat Penelitian	16
b. Metode Pengumpulan Data.....	16
c. Metode Analisa data.....	17
VI. HASIL DAN PEMBAHASAN	18
a. Alternatif Skenario Pengembangan Kawasan Wisata Kedung Ombo	18
b. Alternatif Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Kedung Ombo.....	19
c. Alternatif Program Pada Pengembangan Kawasan Wisata Kedung Ombo.....	21
d. Alternatif Kriteria Evaluasi Keberhasilan.....	22
e. Data Input Analisis MULTIPOL	23
f. Interpretasi Hasil.....	25
a. Evaluasi Berdasarkan Kebijakan Terhadap Skenario	25
b. Evaluasi Program Terhadap Kebijakan	29
g. Opsi Jalur Kebijakan.....	35
VII. KESIMPULAN	36
VII. <i>ROADMAP</i> IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN	40
DAFTAR PUSTAKA	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Spot-spot Wisata di Kawasan Kedung Ombo per Wilayah.....	7
Tabel 2. Aktor, Peran Aktor, dan Tujuan Strategis Pengembangan Kawasan Wisata Kedung Ombo.....	9
Tabel 3. Skenario Pengembangan Kawasan Wisata Kedung Ombo	18
Tabel 4. Alternatif Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Kedung Ombo.....	19
Tabel 5. Alternatif Program/Tindakan pada Pengembangan Kawasan Wisata Kedung Ombo ...	21
Tabel 6. Kriteria Evaluasi Keberhasilan Pengembangan Kawasan Wisata Kedung Ombo	22
Tabel 7. Evaluasi Kebijakan Terhadap Skenario.....	25
Tabel 8. Evaluasi Program Terhadap Kebijakan	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Lokasi Waduk Kedung Ombo.....	6
Gambar 2. Tahapan Penelitian.....	11
Gambar 3. Model Pariwisata Terpadu (dimodifikasi dari (Cawley & Gillmor, 2008).....	15
Gambar 4 . Tahapan Penggunaan Program MULTIPOL	18
Gambar 5. Matriks Dampak Program Terhadap Kriteria Keberhasilan	24
Gambar 6. Matriks Dampak Kebijakan Terhadap Kriteria Keberhasilan.....	24
Gambar 7.Matriks Dampak Skenario Terhadap Kriteria Keberhasilan	24
Gambar 8. Profile Map Pengembangan Kawasan Wisata Kedung Ombo.....	26
Gambar 9. Keterkaitan Antara Kebijakan dan Skenario.....	27
Gambar 10. Sensitivitas Kebijakan Terhadap Skenario	28
Gambar 11. <i>Profile Map</i> Program Terhadap Kebijakan.....	31
Gambar 12. Keterkaitan Kebijakan dan Program	33
Gambar 13. Sensitivitas Program Terhadap Kebijakan.....	34
Gambar 14. Jalur Kebijakan Potensial untuk Mencapai setiap Skenario Masa Depan dalam Kombinasi Kebijakan dan Program	35
Gambar 15. Kebijakan Terintegrasi Pengembangan Kawasan Wisata Kedung Ombo	39
Gambar 16. Model Pariwisata Terpadu dan Berkelanjutan Kedung Ombo	41
Gambar 17. <i>Roadmap</i> Implementasi Pengembangan Kawasan Wisata Terintegrasi Kedung Ombo.....	43

ABSTRAK

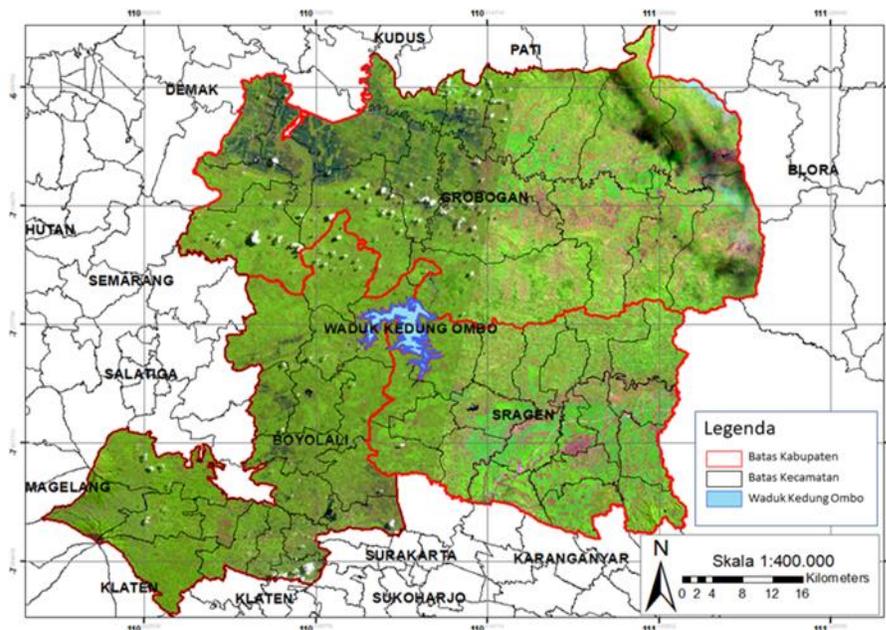
I. LATAR BELAKANG

Pariwisata dipandang oleh banyak negara sebagai peluang besar untuk pembangunan ekonomi dan alat untuk membangun masyarakat yang lebih sejahtera. Pariwisata merupakan kegiatan yang mempunyai efek berganda yang mampu mendorong pembangunan sektor lain secara tidak langsung yaitu di bidang ekonomi, sosial, kewilayahan, dan patrimonial (Hall & Jenkins, 2008). Dalam pariwisata, politik memainkan peran fundamental, karena tindakan pemerintah diperlukan untuk mengarahkan aktivitas wisata guna mendapatkan hasil akhir yang diinginkan dan menjaga tujuan yang ditetapkan dengan baik yang dibingkai oleh visi untuk masa depan.

Indonesia, sebagai salah satu negara yang mempunyai potensi pariwisata sangat beragam menempatkan pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan nasional terbesar. Kawasan Waduk Kedung Ombo adalah satu lokasi di Provinsi Jawa Tengah. yang sangat potensial dikembangkan sebagai destinasi wisata. Hamparan air yang luas, *landscap* bendungan yang indah, topografi yang berbukit-bukit, udara sejuk di pagi dan sore hari, serta pohon-pohon yang tumbuh di area bendungan menciptakan suasana asri dan rindang, merupakan panorama alam yang mempunyai daya tarik wisata tinggi. Animo pengunjung yang cukup kontinyu pada beberapa spot wisata yang ada terutama pada akhir pekan menjadi faktor yang mendukung hal tersebut. Informasi dari Perhutani KPH Telawah sebagai pengelola Kedung Cinta (salah satu spot wisata di Kedung Ombo), pendapatan per bulan yang diterima rata-rata sebesar seratus juta rupiah per bulan. Untuk spot wisata kecil, pendapatan itu cukup berarti.

Waduk Kedung Ombo adalah waduk terbesar se-Asia Tenggara (panjang 1.8 km, lebar 18m, tinggi 96m, terdiri dari lahan perairan seluas 2.830 Ha dan lahan dataran seluas 3.746 Ha) (Ngatwanto, 2018). Lokasi waduk ini membentang di tiga wilayah kabupaten yaitu: Kabupaten Grobogan, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Sragen (Gambar 1), dan berada pada kawasan hutan Perhutani KPH Gundih dan Perhutani KPH Telawah. Jika potensi pariwisata di kawasan Kedung Ombo dikembangkan, maka akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi terkait

dengan peningkatan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar terkait dengan perluasan lapangan kerja. Sejalan dengan itu, akan membantu dalam mengurangi kerusakan hutan akibat pembalakan liar yang cukup tinggi dan mengoptimalkan multifungsi waduk sebagai sarana irigasi, pembangkit listrik dan obyek wisata sebagaimana tujuan dari pembangunan Waduk Kedung Ombo sejak awal. Kelangkaan tujuan wisata khususnya di kabupaten Grobogan dan Sragen, juga merupakan peluang perkembangan kawasan ini ke depan.



Gambar 1. Peta Lokasi Waduk Kedung Ombo

Dari aspek lokasi, kawasan Kedung Ombo berada pada jalur strategis, yaitu jalur utama Solo-Purwodadi. Keunggulan pada aspek lokasi lainnya adalah mudah dijangkau dari berbagai arah. Kawasan ini dapat ditempuh dari arah pintu utama bendungan, yaitu dari desa Geyer Kabupaten Grobogan, dari Kecamatan Sumber Lawang Kabupaten Sragen, dan juga dari Kecamatan Juwangi dan Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali.

Sejak diresmikan pada tahun 1991, berbagai upaya untuk mengembangkan destinasi wisata di kawasan Kedung Ombo sebenarnya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan, Pemkab. Sragen, Perhutani, pemerintah desa, dan masyarakat berupa pembangunan spot-spot wisata (Tabel 1). Namun kondisi spot-spot tersebut sangat kurang

memadai dibandingkan dengan besarnya potensi yang ada dan perkembangannya juga kurang memuaskan.

Tabel 1. Spot-spot Wisata di Kawasan Kedung Ombo per Wilayah

Kabupaten Grobogan	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Sragen
Wisata Rintisan Wonosari Desa Rambat berupa kedai-kedai minum dan <i>speed boad</i>	Wana wisata “Kedung Cinta”, warung apung, kedai-kedai minum, <i>banana boad</i> , atv, pertunjukan seni budaya reog, karaoke, penjual ikan bakar	Desa Wisata Boyolayar, Warung makan, lokasi swa foto, taman edukasi
Lokasi: Desa Rambat, Kecamatan Geyer	Lokasi: Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu	Lokasi: Dukuh Boyolayar. Desa Jati Songo Kecamatan Sumber Lawang
Pemrakarsa: Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) desa Rambat	Pemrakarsa: Perhutani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)	Pemrakarsa: Karang Taruna, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sumber: (Ariyani, Fauzi, & Umar, 2020)

Beberapa hasil penelitian terkait dengan kondisi spot-spot wisata di Kedung Ombo menyatakan, destinasi wisata Kedung Ombo belum terkelola dengan baik, manajemen pengelolaan belum profesional, kurangnya aktivitas wisata, sarana dan prasarana kurang memadai, serta proses pemberian informasi belum terorganisir/tersampaikan dengan baik (Nasrudin, 2017). Menurut Ngatwanto hal itu disebabkan oleh perencanaan yang tidak baik (Ngatwanto, 2018). Sekarwangi menyatakan atraksi wisata di Kedung Cinta kurang menarik minat wisatawan (Sekarwangi, 2020). Hasil observasi peneliti ke lokasi, kondisi jalan menuju kawasan cenderung sering rusak, atraksi wisata kurang menarik, informasi dan sarana wisata (toilet dan tempat parkir) terkesan seadanya. Selain itu kebersihan tidak diperhatikan sehingga terkesan kumuh.

Faktor penyebab lambatnya pengembangan potensi wisata Kedung Ombo diantaranya adalah belum ada regulasi yang mengatur pemanfaatan kawasan ini untuk pariwisata,

rendahnya anggaran pemerintah daerah setempat untuk pengembangan pariwisata, dan belum adanya kesamaan pemikiran antara pihak-pihak yang berkepentingan setempat dalam pengembangan potensi pariwisata di kawasan ini. Faktor yang terakhir ini telah mengakibatkan spot-spot wisata yang dikembangkan oleh Pemkab ditutup, diantaranya Kawasan wisata Waduk Kedung Ombo yang dikembangkan oleh Pemkab. Grobogan telah ditutup sejak tahun 2017 (Hazami, 2018). Hasil wawancara dengan Kepala BBWS Pemalijuana (2019) menyatakan alasan ditutupnya destinasi wisata tersebut adalah karena permasalahan pengelolaan dana parkir. Beberapa spot dan sarana wisata yang telah dikembangkan oleh Pemkab Sragen berupa kebun kelengkeng, hotel, arena pacuan kuda, juga ditutup karena permasalahan dengan Perhutani terkait pemanfaatan lahan tidak menemukan titik temu. Kondisi ini mengakibatkan kawasan yang diharapkan dapat menjadi penyangga destinasi wisata kluster Solo-Sragen-Purwodadi yang merupakan salah satu kluster wisata andalan wisata Jawa Tengah ini belum terwujud.

Hasil penelitian pada tahun 2018 diketahui faktor-faktor strategis yang mendukung dimungkinkannya kawasan Kedung Ombo dikembangkan sebagai destinasi wisata yang berhasil, meliputi: regulasi, infrastruktur, sumber daya, tata kelola, pemasaran pariwisata, dan kesiapan masyarakat. Diantara faktor-faktor tersebut, faktor regulasi tentang pemanfaatan kawasan waduk dan kawasan hutan menjadi kendala terbesar (Ariyani & Fauzi, 2019a). Namun demikian antusiasme dari Pemkab Grobogan dan Sragen dan Perhutani serta masyarakat yang telah membuka spot-spot wisata di beberapa lokasi dapat menjadi gambaran tingginya motivasi dan pentingnya kawasan ini dikembangkan.

Beberapa hasil penelitian dan reportase yang telah disebutkan, menggambarkan perlunya pembenahan dalam pengembangan potensi wisata Kedung Ombo. Pembenahan terutama ditekankan pada aspek perencanaan yang matang, didasarkan pada kebijakan yang tepat dan didukung oleh semua pemangku kepentingan untuk menjamin keberhasilannya. Sebagaimana pernyataan (Velasquez, 2014) diperlukan kebijakan yang komprehensif yang didukung oleh semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan destinasi wisata yang berkelanjutan. Demikian pula pernyataan Siti Nabiha & M Saad, bahwa pengembangan pariwisata yang berhasil lahir dari perencanaan yang cermat yang didukung oleh partisipasi seluruh pemangku kepentingan (Siti-Nabiha & Md Saad, 2015).

Dari hasil penelitian (2019) diketahui bahwa terdapat aktor-aktor pemangku kepentingan yang cukup kompleks di kawasan Kedung Ombo (Tabel 2). Hasil analisis terhadap aktor-aktor tersebut menunjukkan bahwa BBWS Pemalijuana, Perhutani dan Bappeda adalah aktor yang paling berpengaruh. Posisi ini dipengaruhi oleh peran ketiga aktor tersebut yang sangat penting dalam pengembangan kawasan Kedung Ombo sebagaimana tersebut pada Tabel 2. Posisi dominan ketiga aktor tersebut juga menunjukkan kemampuannya dalam menentukan kebijakan pengembangan destinasi wisata Kedung Ombo ke depan (Ariyani & Umar, 2020)

Tabel 2. Aktor, Peran Aktor, dan Tujuan Strategis Pengembangan Kawasan Wisata Kedung Ombo

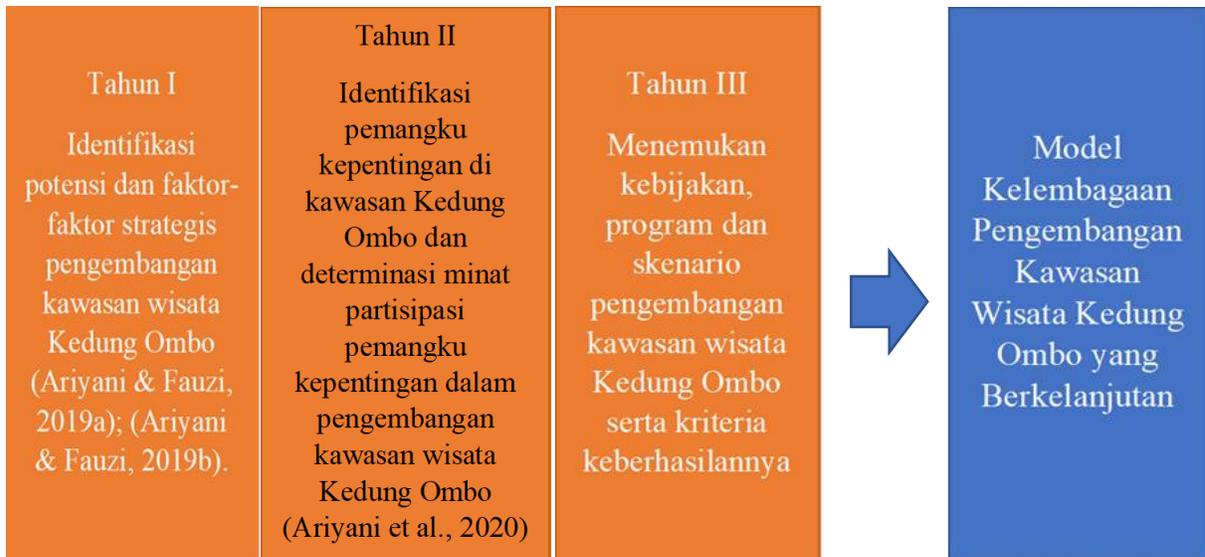
Aktor	Peran	Tujuan Strategis
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemalijuana	Bertanggung jawab dalam operasionalisasi dan pemeliharaan waduk dan kawasan waduk.	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten	Merencanakan pembangunan daerah pada bidang: ekonomi, sosial, budaya dan infrastruktur, yang sekaligus representasi visi dan misi pembangunan Kepala Daerah.	Perluasan lapangan kerja
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Merancang dan melaksanakan program-program pembangunan dan pengembangan daerah dalam bidang pemuda, olahraga dan pariwisata.	Pengembangan infrastruktur
Perhutani	Mengelola dan mengoptimalkan manfaat hasil hutan, jasa lingkungan dan usaha pariwisata alam.	Konservasi fungsi waduk
Pelaku Bisnis	Berinvestasi pada pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana pariwisata di kawasan Kedung Ombo.	Kelestarian hutan
Perguruan Tinggi	Berkontribusi dalam pemikiran dan ide perencanaan pembangunan daerah secara obyektif.	Peningkatan investasi swasta
Pemerintah Desa	Menentukan kebijakan pembangunan di wilayah desa (di	Peningkatan bisnis baru

Aktor	Peran	Tujuan Strategis
Karang Taruna	sekitar kawasan waduk Kedung Ombo). Membuat dan memberi masukan tentang ide-ide kreatif dalam pembangunan dan pengelolaan destinasi pariwisata.	Pengurangan kemiskinan
Tokoh Masyarakat	Menjadi salah satu sumber ide dan kekuatan dalam pembangunan desa.	Terjaganya kearifan lokal

Sumber: (Ariyani & Umar, 2020)

Berdasarkan potensi dan permasalahan yang telah teridentifikasi, maka pengembangan kawasan Kedung Ombo harus dilaksanakan secara terencana yang didukung oleh kebijakan dan program yang tepat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Agar memberikan manfaat yang maksimal, maka pengembangannya harus didasarkan pada potensi yang ada di wilayah ini, yaitu: panorama alam yang indah, keberadaan waduk, dan semangat masyarakat untuk memperbaiki kesejahteraannya, serta kesepakatan dari semua pemangku kepentingan utama khususnya antara BBWS Pemali Juana, Perum Perhutani dan Pemkab Grobogan, Sragen dan Boyolali.

Dalam rangka mendukung terwujudnya kawasan wisata Kedung Ombo yang berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan secara ekonomi, lingkungan maupun sosial (*multiplier effect*), maka penelitian ini dirancang sebagai penelitian multitalahun dengan tahapan seperti pada Gambar 2. Adapun pada tahun ketiga ini, penelitian dirancang untuk menemukan opsi kebijakan, program dan skenario yang tepat sebagai acuan bagi pengambil kebijakan di masa yang akan datang.



Gambar 2. Tahapan Penelitian

II. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan dan tahapan penelitian, maka penelitian ini ditujukan untuk menemukan opsi kebijakan, program dan skenario terbaik dalam mengembangkan kawasan wisata Kedung Ombo yang berhasil dan berkelanjutan.

III. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi:

1. Pengambil kebijakan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Kementerian Kehutanan dan kementerian terkait lainnya sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan regulasi atas pemanfaatan waduk dan hutan, sebagai dasar dalam pengembangan potensi pariwisata dan koodinasi untuk berbagai pemangku kepentingan di kawasan Kedung Ombo.
2. Pemerintah Kabupaten Grobogan, Sragen dan Boyolali serta Perhutani KPH Telawah, Perhutani KPH Gundih dan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana dalam mengembangkan skenario, kebijakan dan program-program pariwisata untuk keberhasilan pengembangan kawasan wisata Kedung Ombo secara berkelanjutan.

IV. LANDASAN TEORI

4.1. Konsep Kelembagaan

Secara teori, kelembagaan diartikan sebagai aturan-aturan formal (*formal rules*) dan informal (*informal rules*) beserta aturan penegakannya (*enforcement rules*) yang membentuk pola interaksi antar individu dalam aktivitas politik, sosial maupun ekonomi (Faundez, 2016). Pemikiran North memberi arah baru dalam ekonomi dengan menyatakan bahwa biaya transaksi dan pengaturan kelembagaan adalah faktor kunci bagi kinerja ekonomi. Pemikiran ini berimplikasi bahwa lembaga-lembaga negara seperti sistem hukum, politik, dan sosial turut menentukan kinerja ekonomi.

Kelembagaan dapat dinilai sebagai aktor kunci dalam membimbing proses politik, ekonomi dan sosial yang dibentuk oleh perjuangan sejarah, aturan dan prosedur; bukan oleh agregasi dari motif individu (Hodgson, 2006). Melalui kelembagaan, sekelompok masyarakat dapat memainkan peranan secara penuh selama mengikuti aturan main, menghindarkankan dari kemungkinan ditetapkannya suatu aturan yang tidak efektif, maupun keterlibatan pihak-pihak yang tidak diinginkan. Kelembagaan memberi kesempatan yang sama (*equal opportunity*) bagi semua pihak untuk melakukan aktivitas dalam meningkatkan kapasitas maupun partisipasi dalam kegiatan yang produktif (Acemoglu, 2003). (Yustika, 2012) menyatakan bahwa dimensi dan kompleksitas permasalahan dapat diurai melalui pendekatan kelembagaan dengan memahami faktor-faktor dan kondisi yang relevan dengan permasalahan tersebut.

Mubyarto mendefinisikan kelembagaan (*institution*) adalah organisasi atau kaidah-kaidah baik formal maupun informal, yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya mencapai tujuan tertentu (Syahriar, 2015). North mengemukakan kelembagaan adalah suatu pola hubungan dan tatanan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat, diwadahi dalam suatu jaringan atau organisasi, yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi dengan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal dan non-formal untuk bekerjasama demi mencapai tujuan yang diinginkan (Ariyani, 2016).

IV.2. Konsep Pengembangan Wisata yang Berkelanjutan

Pengembangan pariwisata diartikan sebagai suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dan mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kelangsungan pengembangan pariwisata (Harrison, 2015). Pengembangan pariwisata membutuhkan proses perencanaan dan manajemen yang menyatukan kepentingan dan kepedulian berbagai kelompok pemangku kepentingan secara berkelanjutan dan strategis (Hemaphan, 2017). Seiring keberhasilan pariwisata, isu keberlanjutan menjadi topik dan konsep penting dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata, terkait dengan sifat inheren pariwisata yang memiliki dampak positif dan negatif terhadap komunitas, ekonomi, dan lingkungan (Postma & Schmuecker, 2017).

Pariwisata berkelanjutan diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pengelolaan dan pengembangan pariwisata yang menjaga keutuhan alam, ekonomi, dan sosial serta menjamin pemeliharaan sumber daya alam dan budaya (Kisi, 2019). Dari pengertian tersebut, pariwisata berkelanjutan tidak hanya dimaknai sebagai sekedar menjaga lingkungan, namun juga melibatkan kelangsungan ekonomi dan keadilan sosial jangka panjang. Pencapaian pariwisata berkelanjutan memerlukan proses pengembangan yang berkelanjutan yang didukung oleh koordinasi semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan pariwisata di wilayah tersebut (Kisi, 2019).

Pengembangan pariwisata juga dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya pada suatu obyek wisata dengan melakukan pembangunan beberapa aspek penunjang kesuksesan pariwisata. Aspek tersebut meliputi aksesibilitas (transportasi dan saluran pemasaran), infrastruktur pariwisata, tingkat interaksi sosial, keterkaitan dengan sektor lain, daya tahan terhadap dampak pariwisata, dan tingkat resistensi komunitas lokal. Tujuan umum dari pengembangan potensi pariwisata adalah menciptakan interaksi jangka panjang yang saling menguntungkan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, kepuasan pengunjung, dan peningkatan keterpaduan dan kesatuan pembangunan masyarakat di sekitar kawasan zona pengembangan (Suardana, I., 2016).

Pengembangan pariwisata secara berkelanjutan harus didasarkan pada potensi yang ada di suatu kawasan. Berdasarkan hal itu kebijakan pengembangan pariwisata dapat

dikelompokkan sebagai berikut: pariwisata berbasis alam, pariwisata berbasis komunitas dan pariwisata terintegrasi. Agar kebijakan pengembangan pariwisata berhasil dilaksanakan maka memerlukan dukungan berupa program-program atau tindakan-tindakan yang tepat disertai dengan skenario yang mampu menjangkau spektrum waktu yang cukup untuk memastikan langkah-langkah yang dilakukan berhasil.

IV.3. Konsep Kebijakan Pengembangan Pariwisata Terpadu

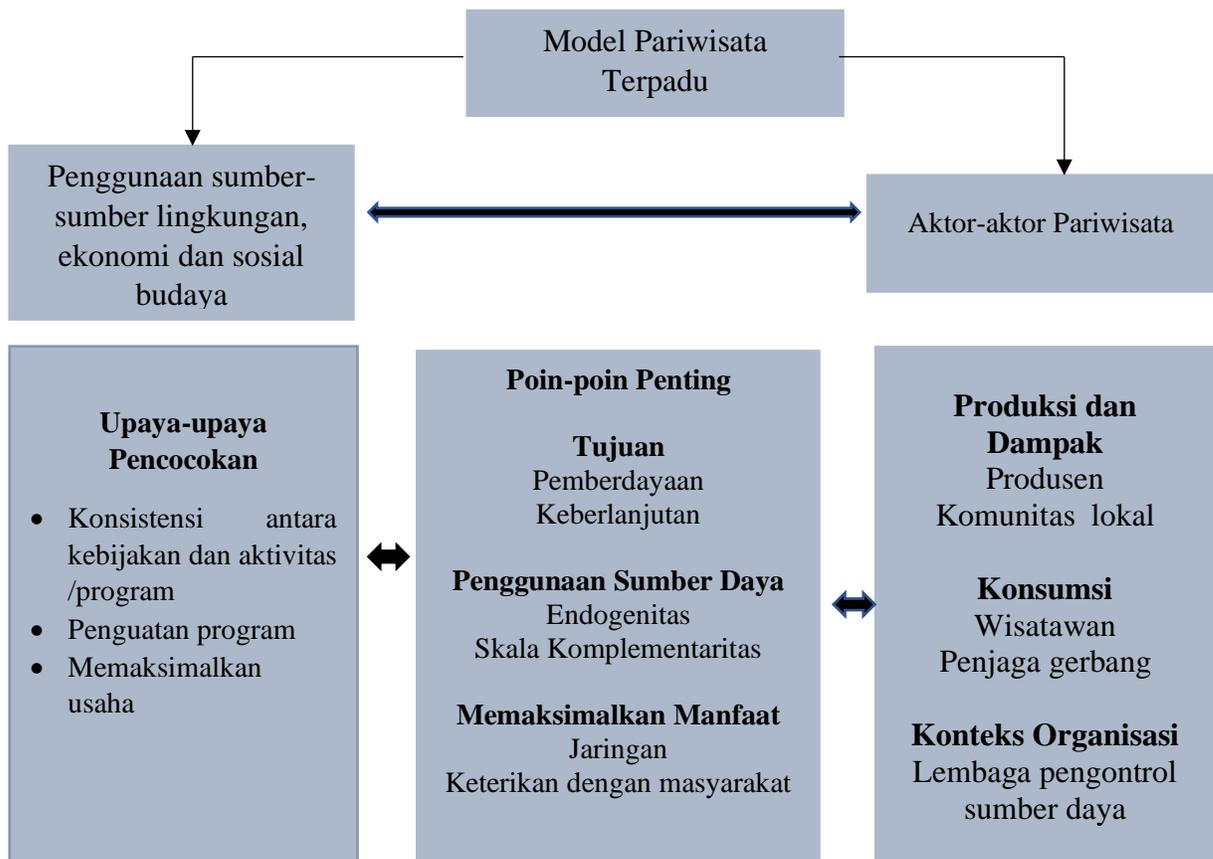
Salah satu konsep pengembangan pariwisata yang dinilai mampu mewujudkan destinasi pariwisata yang berhasil adalah kebijakan pariwisata terpadu yang memperhitungkan penggunaan berbagai sumber daya (budaya, sosial, lingkungan, ekonomi), dan peran pemangku kepentingan terkait, untuk mengeksplorasi metode yang efektif dalam mempromosikan pariwisata sebagai bagian dari strategi pembangunan pariwisata (Cawley & Gillmor, 2008). Pariwisata terpadu juga dapat didefinisikan sebagai jenis pariwisata yang secara eksplisit terkait dengan lokalitas di mana pariwisata itu terjadi dan memiliki hubungan yang jelas dengan sumber daya lokal, kegiatan, produk, industri produksi dan jasa, dan komunitas lokal yang partisipatif (Lisi & Esposito, 2015). Secara longgar pariwisata terpadu dapat didefinisikan sebagai jenis pariwisata yang terkait erat dengan struktur ekonomi, sosial, budaya, alam dan manusia di wilayah tempat hal itu terjadi dan berupaya memanfaatkannya pada tingkat yang optimal. Sedang secara praktis pariwisata terpadu diartikan sebagai jenis pariwisata yang berhubungan langsung dengan ekonomi, kegiatan dan sumber daya yang tersedia di suatu wilayah tertentu dan dengan masyarakat lokal yang berpartisipasi (Puiu & Ovidiu, 2008).

Secara fisik, konsep kawasan pariwisata terpadu adalah kawasan yang dibangun khusus untuk tujuan pariwisata, yang memadukan pembangunan dan pengelolaan daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan fasilitas ekonomi lainnya di dalam satu kawasan. Dalam konteks pelayanan kepada wisatawan, pariwisata terintegrasi memiliki potensi untuk menawarkan kepada wisatawan campuran antara produk, layanan, dan pengalaman lokal yang khas (Moore Rowland, Mott McDonald, 2019).

Tujuan dasar *integrated tourism* adalah untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya dalam pariwisata dan untuk memberdayakan masyarakat lokal dan dengan demikian berkontribusi pada keberlanjutan sistem

pembangunan wilayah yang lebih luas. Secara spesifik, tujuan pariwisata terpadu meliputi dua aspek, yakni 1) menyatukan berbagai kepentingan, persyaratan, dan kebutuhan, dalam satu kesatuan rencana pariwisata strategis. 2) Menyatukan pariwisata dengan kehidupan sosial dan ekonomi suatu daerah dan komunitasnya. Meskipun terdapat bukti bahwa beberapa destinasi pariwisata telah berkembang tanpa perencanaan strategis dan terintegrasi yang disadari, banyak dari mereka mengalami konsekuensi yang tidak terduga (baik fisik, atau manusia, atau pemasaran atau dampak organisasi) yang telah menyebabkan kemundurannya (Reza, 2019).

Integrated tourism mengacu pada konsep-konsep yang berkaitan dengan alternatif pembangunan dalam menekankan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up approach*) yang melibatkan pemangku kepentingan lokal secara terpusat dalam pelaksanaannya dan yang didasarkan pada sumber daya fisik, ekonomi, sosial, dan budaya lokal (Cawley & Gillmor, 2008). Model dari kebijakan pariwisata terpadu dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Model Pariwisata Terpadu (dimodifikasi dari (Cawley & Gillmor, 2008))

V. METODE PENELITIAN

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat prospektif untuk menjangkau pemikiran ke masa depan selain mendasarkan pada permasalahan eksisting. Dari segi metode, penelitian ini menggunakan pendekatan *mix method* yang menggabungkan antara konsep penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif.

b. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan partisipatori, yaitu melibatkan *stakeholder* untuk mendapat masukan dan penilaian terhadap serangkaian alternatif pemikiran untuk mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, kuesioner dan diskusi kelompok fokus (FGD). Narasumber wawancara adalah: 1) Kepala Bappeda Kabupaten Grobogan (), 2) Junior Manajer Bisnis Perum Perhutani KPH Gundih, 3) Subkoordinator PLT Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara BBWS Pemali Juana, 4) Kepala Bappeda Sragen dan 5) Junior Manajer Bisnis Perum Perhtani KPH Telawah. Narasumber ini sekaligus menjadi responden pada metode kuesioner.

Metode diskusi kelompok fokus FGD dilakukan di Bappeda Sragen dengan melibatkan 10 (sepuluh) organisasi perangkat daerah Kabupaten Sragen, yaitu: 1) Badan Perencana Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4) Dinas Perumahan dan Permukiman, 5) Dinas Pertanian, 6) Dinas Komunikasi dan Informatika, 7) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, 8) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 9) Dinas Lingkungan Hidup, 10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. FGD dilakukan untuk menentukan alternatif dan bobot kriteria evaluasi keberhasilan pengembangan kawasan wisata Kedung Ombo, alternatif program, alternatif kebijakan, dan alternatif skenario.

FGD juga dilakukan di Bappeda Boyolali dan di Solo dengan peserta perwakilan dari *stakeholder* Kedung Ombo, yaitu BBWS, Pemkab Grobogan, Sragen dan Boyolali, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan Dosen. Untuk melengkapi ide-ide secara komprehensif juga dilakukan FGD dengan para mahasiswa pascasarjana Manajemen Pariwisata. Hasil FGD

kemudian *dismoothing* melalui pendekatan *expert judgement* untuk mendapatkan data yang siap diolah.

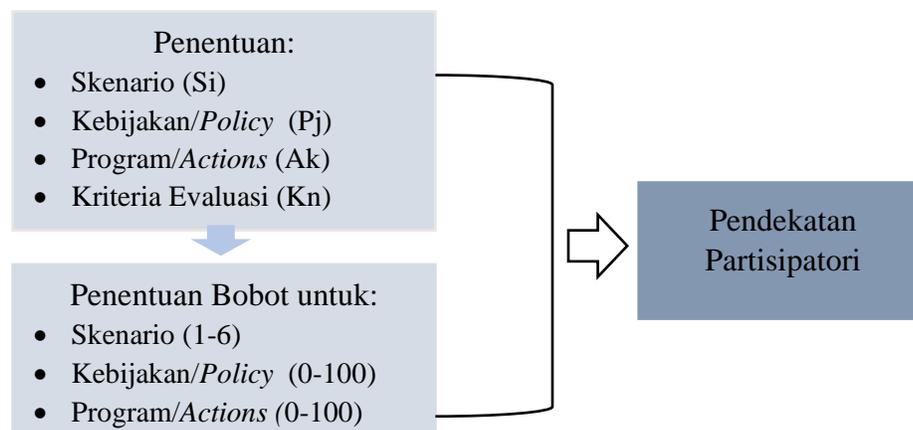
c. Metode Analisa data

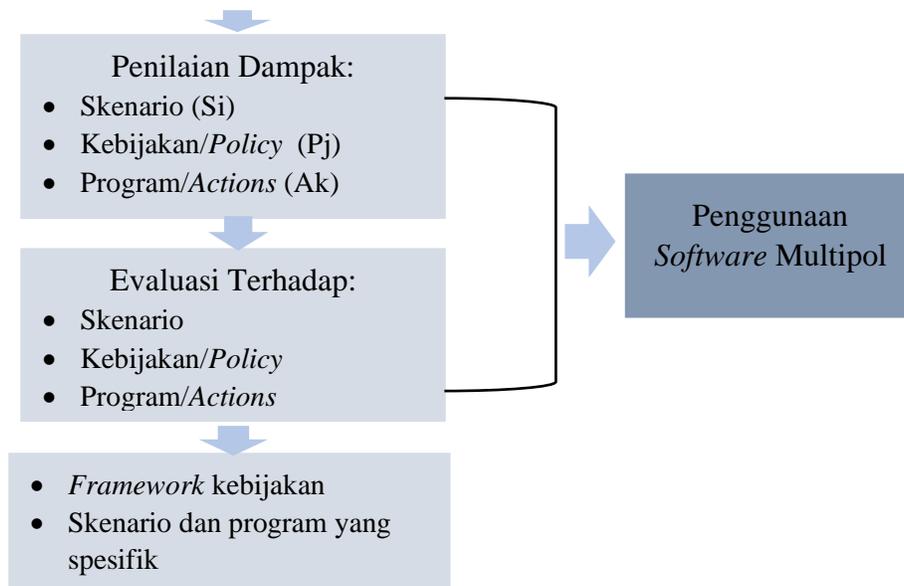
Analisa data penelitian ini menggunakan pendekatan multikriteria yaitu, penggunaan skor dan bobot untuk menentukan hierarki atau pilihan terbaik dari satu set alternatif pilihan (Fauzi, 2019). Analisis data dibantu oleh program MULTIPOL (*MULTI criteria-POLicy*), yang merupakan metode evaluasi multikriteria diskrit untuk menguji keefektifan berbagai kebijakan dan tindakan terhadap skenario dan untuk menentukan opsi *actions*, *policies* dan *scenarios* pada permasalahan yang dikaji berdasarkan rata-rata tertimbang dan simpangan baku (Stratigea, 2013).

Sebagai suatu model komprehensif, input dasar metode evaluasi MULTIPOL terdiri dari:

- Kriteria evaluasi (*criteria*), yaitu dimensi penilaian yang dapat diukur dari berbagai kemungkinan pilihan yang sedang dipertimbangkan dapat dicapai. Kriteria evaluasi merupakan landasan dari setiap proses evaluasi untuk menilai kinerja dari alternatif skenario, kebijakan dan program-program yang terlibat dalam proses evaluasi.
- Skenario (*scenarios*), yaitu perkembangan masa depan yang terstruktur di mana tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk sistem/ masalah yang dihadapi tercapai.
- Kebijakan (*policy*), sebagai strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran dalam perencanaan yang berkaitan erat dengan konteks politik, sosial, ekonomi dan fisik, di mana evaluasi berlangsung.
- Tindakan kebijakan (*actions*): berkaitan dengan intervensi potensial yang bertujuan untuk implementasi berbagai kebijakan.

Adapun tahapan analisis data berdasarkan program MULTIPOL sebagai berikut:





Gambar 4 . Tahapan Penggunaan Program MULTIPOL

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Alternatif Skenario Pengembangan Kawasan Wisata Kedung Ombo

Keberhasilan pengembangan kawasan wisata Kedung Ombo perlu didukung dengan skenario yang tepat terkait dengan peningkatan infrastruktur, penyediaan sarana prasarana wisata, perbaikan layanan wisata maupun dalam penguatan minat kedatangan wisatawan ke destinasi wisata ini. Berdasarkan hasil diskusi kelompok fokus telah teridentifikasi dua set skenario serta bobot kepentingan masing-masing skenario sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Skenario Pengembangan Kawasan Wisata Kedung Ombo

No	Skenario	Deskripsi	Bobot
1	<i>Supply side</i>	Skenario pengembangan kawasan wisata yang menekankan pada upaya dari penyedia dalam meningkatkan infrastruktur, meningkatkan layanan wisata, sarana prasarana, dukungan dan keterlibatan pemangku kepentingan, serta	6

		peningkatan kapasitas masyarakat dan tenaga pariwisata.	
2	<i>Demand side</i>	Skenario pengembangan kawasan wisata yang menekankan pada upaya untuk meningkatkan minat kunjungan wisatawan melalui: pengembangan atraksi wisata, penentuan tarif dan <i>value proposition</i> , pengembangan sistem informasi dan promosi pariwisata dan layanan pengunjung.	4

Sumber: FGD Wisata Kedung Ombo, 2020

b. Alternatif Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Kedung Ombo

Pengembangan kawasan wisata Kedung Ombo yang berhasil harus didasarkan pada potensi yang ada di wilayah ini terkait dengan keberadaan waduk Kedung Ombo, lokasi yang sebagian besar berada di area hutan dan berada pada tiga wilayah kabupaten, dan minat masyarakat khususnya para pemuda dalam membangun spot-spot dan atraksi wisata untuk menarik wisatawan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok fokus dan penilaian pakar, maka diperoleh alternatif kebijakan dan bobot masing masing kebijakan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Alternatif Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Kedung Ombo

No	Alternatif Kebijakan	Deskripsi	Bobot
1	Wisata Alam khusus (<i>Specific Nature based tourism</i>)	Pengembangan pariwisata yang mendasarkan pada kekhasan sumber daya alam kawasan Kedung Ombo. Kebijakan ini menekankan pada aspek natural panorama kawasan Kedung Ombo yang berada pada kawasan hutan dengan topografi berbukit-bukit. Kegiatan wisata yang dapat dikembangkan diantaranya: berpetualang, <i>camping, trekking, hiking, cycling, gambling</i> , memotret, dll.	6
2	Pariwisata berbasis komunitas (<i>Community based tourism</i>)	Pengembangan pariwisata yang mengedepankan peran serta aktif masyarakat. Pariwisata berbasis	5

		<p>komunitas menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam berbagai kegiatan kepariwisataan. Kebijakan ini didasarkan pada potensi masyarakat yang telah muncul pada beberapa spot wisata rintisan di kawasan Kedung Ombo. Kegiatan yang dapat dikembangkan: wisata petik buah, wisata bakar ikan, tinggal di rumah penduduk untuk mengetahui kebiasaan dan adat istiadat (wisata budaya pedesaan).</p> <p>Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (<i>Community Based Tourism</i>) dikembangkan berdasarkan prinsip keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan berbagai <i>stakeholders</i> pembangunan pariwisata termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat bertujuan untuk: 1) memberdayakan masyarakat; 2) meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata agar dapat memperoleh keuntungan ekonomi, sosial budaya dari pembangunan pariwisata; 3) memberikan kesempatan yang seimbang kepada semua anggota masyarakat. Oleh karena itu pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menuntut koordinasi dan kerja sama serta peran yang berimbang antara berbagai unsur <i>stakeholders</i> termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat (Syahriar, 2015).</p>	
3	Pariwisata berbasis waduk (<i>Dambase tourism</i>)	<p>Pariwisata yang memanfaatkan Waduk Kedung Ombo di samping fungsi utamanya sebagai sarana irigasi. Kebijakan ini menekankan waduk Kedung Ombo sebagai “<i>icon</i>” Kegiatan yang dapat dikembangkan antara lain wisata edukasi ekosistem air tawar, menikmati <i>landscape</i>, mendayung, <i>fishing</i>, <i>speed boad</i>, perahu, rumah makan apung, dll.</p>	6

4	Pariwisata terpadu (<i>Integrated tourism</i>)	Pariwisata yang memadukan semua rencana pariwisata pemangku kepentingan. Kebijakan ini menekankan upaya keterpaduan antar berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan potensi kawasan wisata Kedung Ombo. Pariwisata terpadu akan menentukan suatu titik lokasi untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya dan terkoneksi dengan berbagai atraksi wisata untuk memenuhi berbagai tujuan wisata (<i>multi purpose</i>). Kegiatan yang dapat dikembangkan antara lain, pacuan kuda, wisata agro, taman safari, lapangan golf, kereta gantung untuk menikmati pemandangan kompleks Kedung Ombo dari ketinggian, taman bermain, kuliner, dll.	6
---	--	--	---

Sumber: FGD Wisata Kedung Ombo, 2020

c. Alternatif Program Pada Pengembangan Kawasan Wisata Kedung Ombo

Untuk mendukung skenario dan kebijakan, maka perlu dirancang dan ditetapkan serangkaian program/tindakan sebagai intervensi. Hasil FGD menemukan sejumlah program yang dinilai mampu mendukung pencapaian upaya tersebut, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Alternatif Program/Tindakan pada Pengembangan Kawasan Wisata Kedung Ombo

No	Alternatif Program	Deskripsi
1	Peningkatan kualitas infrastruktur	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur: jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih, dan keamanan.
2	Peningkatan <i>amenitas</i> (layanan dan fasilitas pendukung)	Pembangunan tempat parkir, toilet bersih, sarana ibadah, kios cinderamata, <i>homestay</i> dan fasilitas wisata lainnya.
3	Peningkatan sarana informasi dan komunikasi (ICT)	Pembangunan dan pengembangan jaringan informasi, komunikasi dan telekomunikasi dan pengembangan sistem informasi pemasaran.

4	Peningkatan tata kelola	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembentukan forum pariwisata (Pokdarwis) yang beranggotakan Pemda, Perhutani, BBWS Pemalijuana, swasta dan masyarakat ▪ Perumusan standar pelayanan wisata
5	Pendidikan dan pelatihan	Peningkatan pengetahuan kemampuan dan masyarakat dan tenaga kerja pariwisata
6	Peningkatan investasi swasta	Peningkatan keterlibatan swasta yang didukung dengan pemberian izin khusus dan insentif pajak.
7	Pengembangan atraksi wisata	Pengembangan produk-produk atraksi wisata
8	Peningkatan promosi dan penguatan <i>brand image</i>	Penguatan promosi dan <i>brand image</i>

Sumber: FGD Wisata Kedung Ombo, 2020

d. Alternatif Kriteria Evaluasi Keberhasilan

Keberhasilan pengembangan kawasan Kedung Ombo harus dapat diukur. Keberhasilan tersebut juga harus memberikan dampak positif kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di kawasan ini, yang meliputi: Perhutani, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Pemkab Grobogan, Sragen Boyolali dan masyarakat. Berdasarkan wawancara, kuesioner, FGD dan penilaian pakar, diperoleh alternatif kriteria untuk mengevaluasi keberhasilan pengembangan kawasan Kedung Ombo sebagai berikut (Tabel 6).

Tabel 6. Kriteria Evaluasi Keberhasilan Pengembangan Kawasan Wisata Kedung Ombo

No.	Domain	Kriteria Keberhasilan
1	Ekonomi	▪ Peningkatan pendapatan (masyarakat Daerah, Perhutani)
		▪ Peningkatan daya saing
		▪ Tumbuhnya usaha pariwisata

2	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas sarana jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi
3	Lingkungan	Pengurangan kerusakan lingkungan (penebangan hutan liar, pemanfaatan waduk tidak sesuai peruntukan)
4	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyerapan tenaga kerja
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan inklusi/keterlibatan pemangku kepentingan
5	Sumber daya manusia	Peningkatan kemampuan dan kapasitas masyarakat dan tenaga kerja pariwisata
6	Pembangunan ekonomi wilayah	Peningkatan pembangunan di seluruh wilayah Kedung Ombo

Sumber: FGD Wisata Kedung Ombo, 2020

e. Data Input Analisis MULTIPOL

Setelah keempat komponen input analisis kebijakan teridentifikasi, maka sesuai dengan prinsip MULTIPOL, tahap berikutnya adalah memasukkan hasil penilaian peserta diskusi kelompok fokus yang telah dikonfirmasi dengan penilaian pakar (*expert judgement*) ke dalam program MULTIPOL. Hasil penilaian tentang dampak program, kebijakan, skenario terhadap kriteria keberhasilan tersebut dapat dilihat pada Gambar 5-7.

	Income	Daya Saing	New Bisnis	Kualifinfrast	Environment	Employment	Inklusi	Kapasitas SDM	PEL
Peningkatan infrastruktur	5	4,5	5	4,5	2	2,5	2,5	2,5	3,75
Peningkatan amenities	4	4,5	3,75	4,25	3	2,5	2,5	2	2
Peningkatan sarana informasi, komunikasi (ICT)	4	5	5	3	3,75	1,25	2,5	2,5	3
Peningkatan tata kelola	2,5	4,25	2,5	4,25	1,5	1,25	3	5	4,5

Pendidikan dan pelatihan	4,5	3	3,75	1,5	0,5	5	4	5	1,25
Peningkatan investasi swasta	3,75	5	3,75	3,75	2	4,75	2,5	2,5	5
Pengembangan atraksi wisata	5	3	4,5	2,5	3	2,5	2,5	2,5	2,5
Penguatan promosi dan <i>brand image</i>	4	4	4,25	2	3,75	1,25	3,5	3,5	1,25

Sumber: Multipol Kedung Ombo, 2020

Gambar 5. Matriks Dampak Program Terhadap Kriteria Keberhasilan

	Jumlah	Income	Daya Saing	New bisnis	KualitasInfra	Environtmen	Employment	Inklusi	Kapasitas SDM	PEL
Pariwisata Alam Khusus	100	12	8	10	13	18	10	10	9	10
Pariwisata berbasis komunitas	100	18	10	10	9	11	13	6	15	8
Pariwisata berbasis waduk	100	15	10	11	15	18	8	5	8	10
Pariwisata terpadu	100	20	11	10	16	6	12	6	8	11

Sumber: Multipol Kedung Ombo, 2020

Gambar 6. Matriks Dampak Kebijakan Terhadap Kriteria Keberhasilan

	Jumlah	Income	Daya Saing	New bisnis	KualitasInfra	Environtmen	Employment	Inklusi	Kapasitas SDM	PEL
<i>Supply Side</i>	100	16	18	12	15	6	10	10	8	7
<i>Demand Side</i>	100	20	12	18	8	2	15	8	8	5

Sumber: Multipol Kedung Ombo, 2020

Gambar 7. Matriks Dampak Skenario Terhadap Kriteria Keberhasilan

f. Interpretasi Hasil

Data pada Gambar 5-7 kemudian diproses oleh program MULTIPOL untuk dievaluasi terkait dengan kinerja program terhadap kebijakan dan kinerja kebijakan terhadap skenario. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk membangun opsi kebijakan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan dalam pengembangan kawasan wisata Kedung Ombo. Setiap hasil evaluasi ditampilkan dalam Tabel Skor, Peta Profil, Peta Sensitivitas, dan Peta Kedekatan sebagai berikut.

a. Evaluasi Berdasarkan Kebijakan Terhadap Skenario

Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kinerja alternatif kebijakan terhadap setiap skenario. Evaluasi didasarkan pada nilai rata-rata setiap kebijakan secara keseluruhan dan nilai simpangan baku yang menunjukkan sensitivitas dari setiap kebijakan terhadap skenario (Stratigea, 2013). Berdasarkan evaluasi ini, kinerja kebijakan terbaik ditunjukkan oleh nilai rerata yang tinggi dan simpangan baku yang rendah. Kombinasi kedua indikator tersebut akan menentukan posisi dari program dalam hierarki (Fauzi, 2019). Hasil analisis Multipol setiap kebijakan disajikan pada Tabel 7, Gambar 8-10.

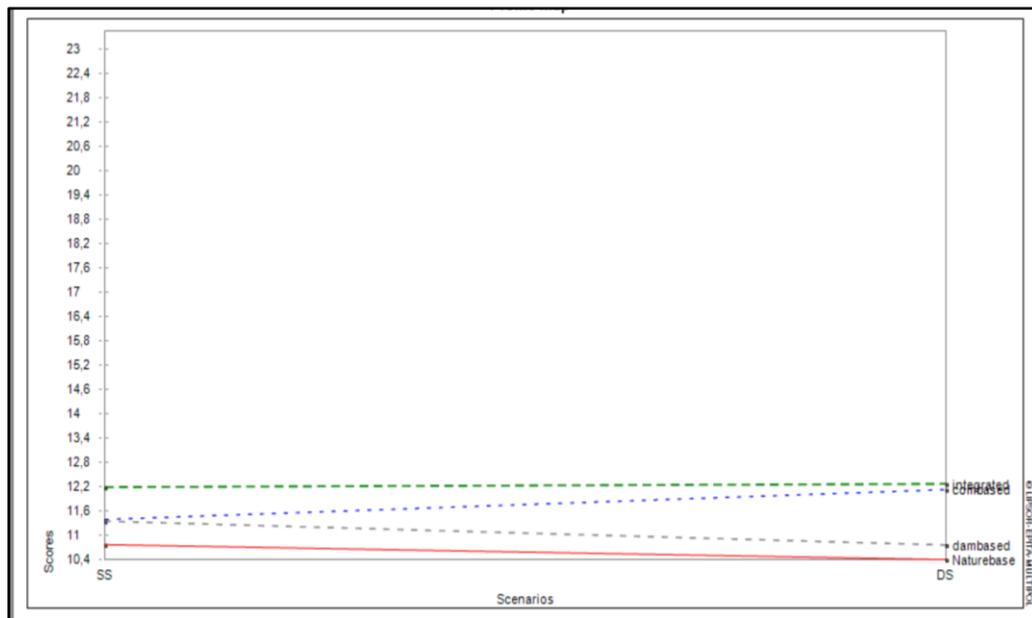
Tabel 7. Evaluasi Kebijakan Terhadap Skenario

Kebijakan	Skenario		Nilai rerata	Simpangan Baku	Posisi
	<i>Supply Side</i>	<i>Demand Side</i>			
Pariwisata berbasis alam (<i>Nature base Tourism</i>)	10,8	10,4	10,7	0,2	1
Pariwisata berbasis komunitas (<i>Community base Tourism</i>)	11,4	12,2	11,7	0,4	3
Pariwisata berbasis waduk (<i>Dam base Tourism</i>)	11,4	10,8	11,1	0,3	2
Pariwisata terpadu (<i>Integrated Tourism</i>)	12,2	12,3	12,3	0	4

Sumber: Multipol Kedung Ombo, 2020

Berdasarkan Tabel 7 dan Gambar 8 diketahui kinerja opsi kebijakan berdasarkan pengaruhnya terhadap skenario sebagai berikut.

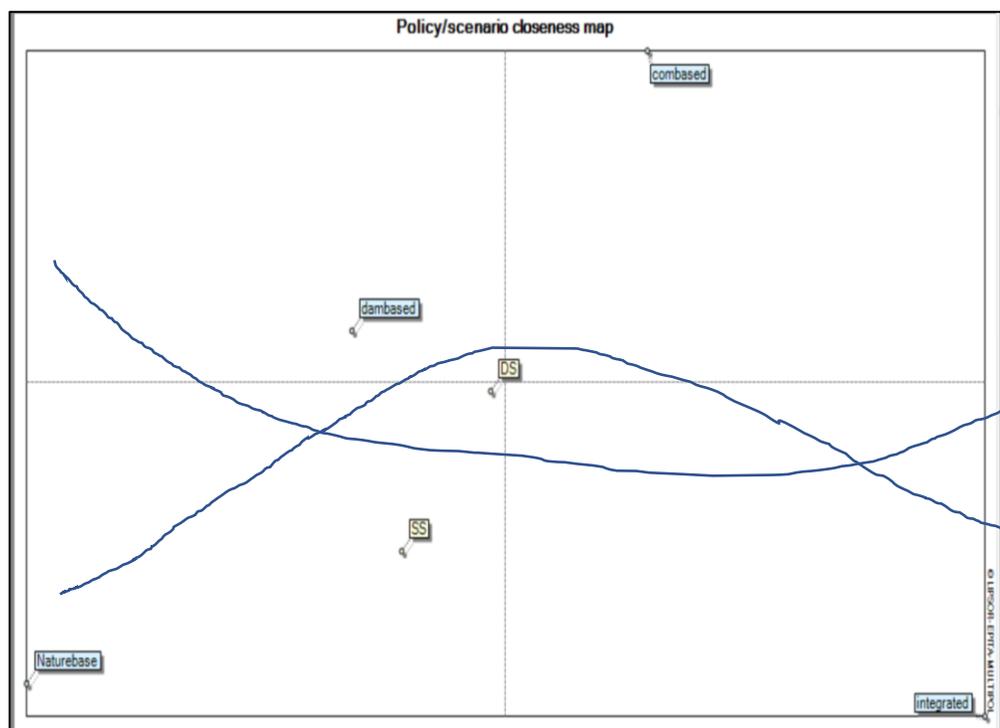
- Kebijakan pariwisata terpadu (*integrated tourism*) merupakan kebijakan yang paling paling baik dengan nilai rata-rata 12,3 dan simpangan baku 0. Pada peringkat kedua adalah kebijakan pariwisata berbasis komunitas (*community base tourism*), selanjutnya kebijakan pariwisata berbasis waduk (*dam base tourism*). Kebijakan pariwisata berbasis alam (*nature base tourism*) merupakan kebijakan yang paling tidak diunggulkan, karena nilai rata-ratanya terkecil.
- Dari Gambar 8 diketahui urutan kebijakan terbaik pada tiap skenario sebagai berikut. Pada skenario SS (*Suply Side*), kebijakan terbaik adalah kebijakan *integrated tourism*, diikuti pada urutan selanjutnya adalah kebijakan pariwisata berbasis komunitas yang berimpit dengan kebijakan pariwisata berbasis waduk. Temuan ini mengindikasikan bahwa memungkinkan jika kedua kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan. Pada skenario SS kebijakan pariwisata berbasis alam berada pada urutan terakhir.
- Pada skenario DS (*demand side*), nampaknya kebijakan pariwisata berbasis alam tidak sesuai. Kebijakan pariwisata terpadu merupakan kebijakan terbaik, diikuti oleh kebijakan pariwisata berbasis komunitas. Sedangkan kebijakan pariwisata berbasis waduk juga agak kurang sesuai meskipun masih dapat diaplikasikan.



Sumber: Multipol Kedung Ombo, 2020

Gambar 8. Profile Map Pengembangan Kawasan Wisata Kedung Ombo

Untuk mengetahui kesesuaian tiap kebijakan dengan skenario dapat dilihat pada Gambar 9. Dari gambar ini diketahui bahwa kebijakan pariwisata terpadu (*integrated tourism*) sesuai dengan skenario yakni SS (*supply side*) dan DS (*demand side*) sekaligus. Sedangkan kebijakan pariwisata berbasis komunitas lebih sesuai dengan skenario DS. Sementara kebijakan berbasis waduk (*dam based*) dan *nature based tourism* lebih sesuai dengan skenario SS. Temuan ini menguatkan analisis sebelumnya tentang kebijakan *integrated tourism* sebagai kebijakan terbaik karena sesuai untuk skenario manapun.



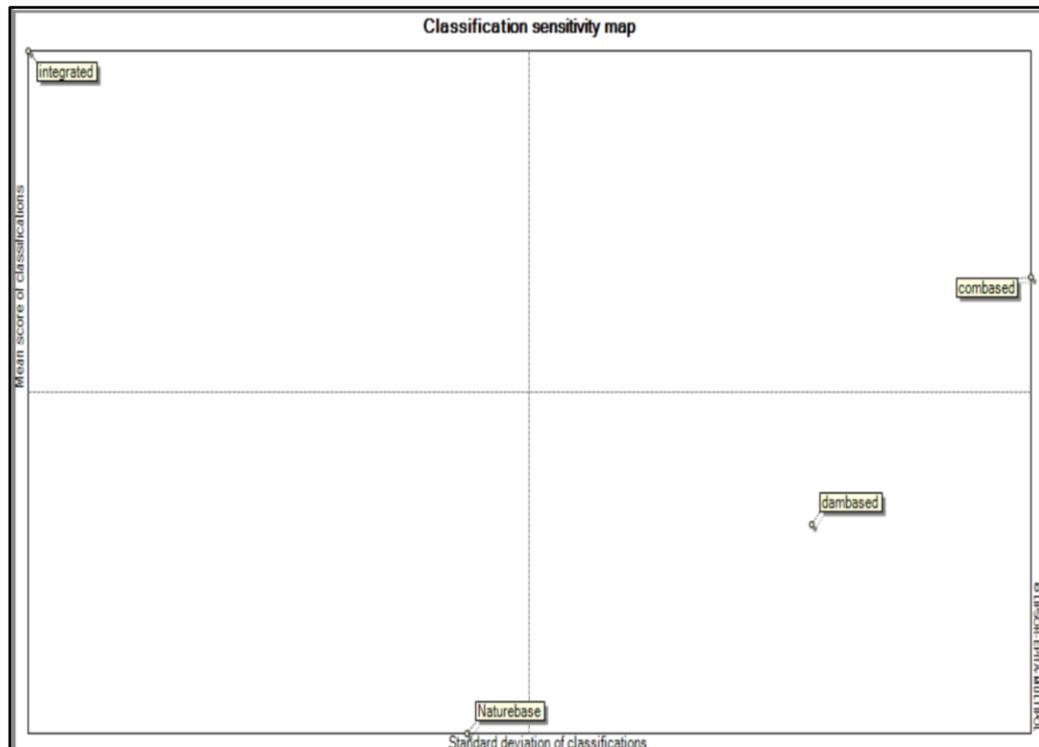
Sumber: Multipol Kedung Ombo, 2020

Gambar 9. Keterkaitan Antara Kebijakan dan Skenario

Untuk mengetahui sensitivitas atau kesetabilan dari tiap-tiap kebijakan dapat dilihat pada Gambar 10. Gambar 10 menyajikan peta sensitivitas program, dimana sumbu (X) mengacu pada standar deviasi, sedangkan sumbu (Y) menunjukkan kinerja suatu kebijakan berkenaan dengan skenario yang diukur dengan nilai rata-rata dan standar deviasi. Kebijakan yang menunjukkan nilai rata-rata tinggi dan deviasi standar rendah bekerja dengan baik untuk lebih dari satu kebijakan. Sebaliknya, kebijakan yang menghadirkan deviasi standar

yang tinggi lebih bersifat spesifik terhadap skenario tertentu dan kinerja kebijakan tersebut untuk setiap skenario bergantung pada nilai rata-ratanya.

Analisa ini membagi kebijakan pada empat kuadran, yaitu kuadran 1: nilai rata-rata tinggi dan standar deviasi rendah, kebijakan yang ada pada kuadran ini merupakan kebijakan yang paling baik, paling sesuai dan paling stabil. Kuadran 2: nilai rata-rata tinggi dan standar deviasi tinggi, kuadran 3: nilai rata-rata rendah dan standar deviasi tinggi, dan kuadran 4: nilai rata-rata rendah dan standar deviasi tinggi, kebijakan yang ada pada kuadran ini merupakan kebijakan yang paling labil.



Sumber: Multipol Kedung Ombo, 2020

Gambar 10. Sensitivitas Kebijakan Terhadap Skenario

Berdasarkan proposisi tersebut, maka kebijakan pariwisata terpadu (*integrated tourism policy*) adalah kebijakan yang paling baik, paling sesuai dan paling stabil. Kebijakan ini sesuai untuk *supply side skenario* maupun *demand side scenario*, sebagaimana telah

dijelaskan sebelumnya. Sementara *community base tourism policy* adalah kebijakan yang cukup stabil. Sedangkan kebijakan *dam base tourism* merupakan kebijakan yang cukup labil. Kebijakan pariwisata berbasis alam *nature base tourism* merupakan kebijakan yang paling labil. Temuan ini sekali lagi menguatkan kualitas dari kebijakan pariwisata terpadu yang merupakan kebijakan paling tepat diterapkan di Kawasan Wisata Kedung Ombo.

b. Evaluasi Program Terhadap Kebijakan

Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kinerja program-program alternatif terhadap kinerja setiap kebijakan. Evaluasi dilakukan dengan cara yang sama dengan ketika mengevaluasi kebijakan terhadap skenario. Hasil analisis Multipol berdasarkan rerata skor serta simpangan baku setiap program disajikan pada Tabel 8 dan Gambar 11-13.

Tabel 8. Evaluasi Program Terhadap Kebijakan

Program	Kebijakan				Nilai rerata	Simpangan Baku	Posisi
	Nature Base Tourism	Community Base Tourism	Dam Base Tourism	Integrated Tourism			
Peningkatan Inftrastruktur	14	14,5	14,7	15,6	14,8	0,6	8
Peningkatan <i>Amenities</i>	12,8	12,8	13,3	13,4	13,1	0,3	4
Penguatan ICT	13,4	13,3	14	13,5	13,6	0,3	6
Penguatan Tata kelola	12,7	13,1	13,1	14	13,3	0,5	5
Pendidikan dan pelatihan	11,7	13,7	11,3	13	12,5	1	2
Investasi Swasta	14	14,5	14,3	15,3	14,6	0,5	7
Pengembangan atraksi wisata	12,5	13	12,9	13,1	12,9	0,2	3
Penguatan promosi dan <i>brand image</i>	12,1	12,4	12,4	11,8	12,2	0,2	1

Sumber: Multipol Kedung Ombo, 2020

Berdasarkan Tabel 8 diketahui kinerja masing-masing program dalam kaitannya dengan kebijakan yang akan diterapkan di kawasan wisata Kedung Ombo sebagai berikut:

- Program peningkatan infrastruktur dengan nilai rata-rata 14,8 dan simpangan baku 0,6 adalah program terbaik atau menjadi prioritas. Pada peringkat berikutnya adalah program peningkatan investasi swasta (nilai rata-rata 14,6, simpangan baku 0,5), dan program penguatan teknologi komunikasi dan informasi (*information communication technology-ICT*) (nilai rata-rata 13,3, simpangan baku 0,3). Ketiga program ini merupakan program unggulan untuk pengembangan kawasan wisata Kedung Ombo.

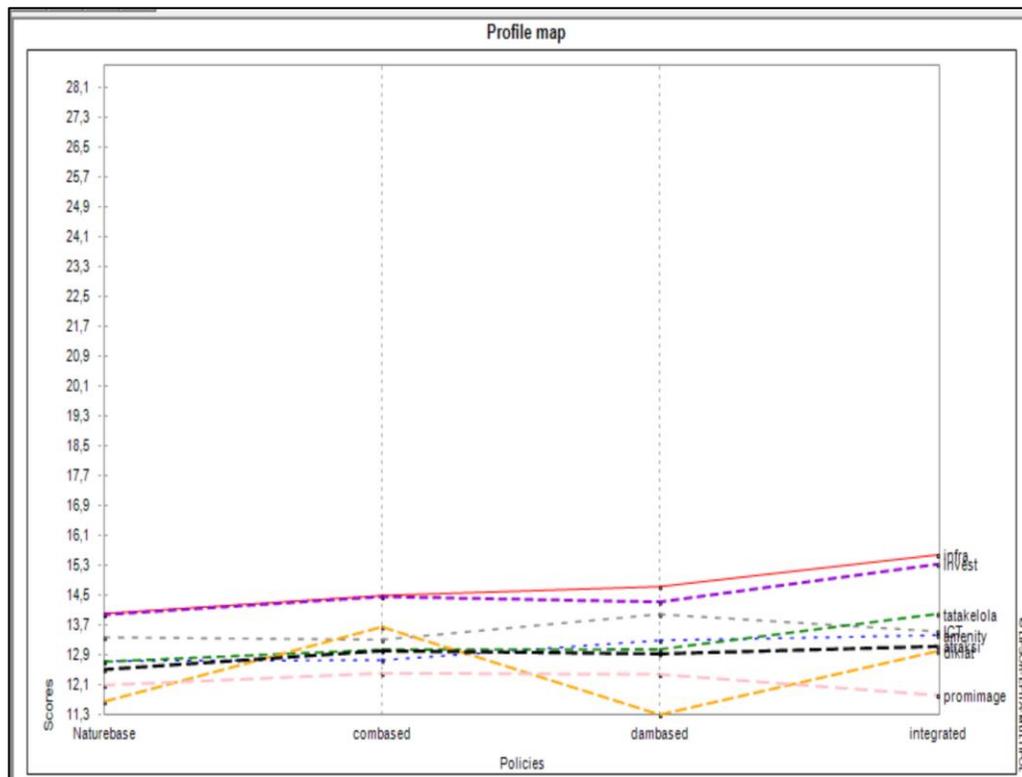
Hasil evaluasi ini tepat mengingat kondisi infrastruktur di kawasan Kedung Ombo masih sangat memerlukan perbaikan. Kondisi jalan, kecukupan listrik dan ketersediaan air bersih, adalah tiga jenis prasarana utama yang harus ditingkatkan untuk mendukung keberhasilan pengembangan kawasan wisata Kedung Ombo. Hal ini terungkap pada diskusi kelompok fokus, sebagian peserta menyampaikan perlunya peningkatan ketiga prasarana tersebut. Sedang peningkatan investasi swasta relevansinya sangat kuat disebabkan keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk pengembangan sarana-prasarana dan amenitas kawasan wisata, bahkan Perhutani dan BBWS tidak mempunyai anggaran untuk hal tersebut. Sehingga kolaborasi dengan swasta menjadi program prioritas untuk meningkatkannya. Investasi swasta dapat didorong oleh Pemkab dengan memberikan izin khusus dan insentif pajak. Demikian pula penguatan sarana komunikasi dan teknologi yang selama ini masih terbatas. Lokasi kawasan Kedung Ombo saat ini hanya dapat dijangkau oleh provider telepon seluler Telkomsel dan Indosat. Kondisi ini tentu memerlukan perbaikan mengingat konektivitas komunikasi dan penyebaran informasi saat ini sangat memerlukan dukungan ICT. Demikian pula perilaku wisatawan yang suka mengabadikan momen wisatanya dan menyebarkannya melalui media sosial perlu difasilitasi.

- Program penguatan promosi dan *brand image* merupakan program kinerjanya kurang baik dengan nilai rata-rata terkecil (12,2) dengan nilai simpangan baku yang cukup besar (0,2), sehingga menduduki posisi paling akhir dalam urutan program terbaik.

Penjelasan lebih spesifik evaluasi masing-masing program terhadap kebijakan dapat dilihat pada Gambar 11 tentang peta profil (*profile map*) yang menghubungkan skor masing-masing program (*actions*) dengan kebijakan (*policy*), dan Gambar 12 yang menyajikan kedekatan (*closness map*) antara tiap-tiap program dengan kebijakan.

Dari Gambar 11 diketahui program-program yang menjadi unggulan dari setiap alternatif kebijakan sebagai berikut:

- Program yang paling baik untuk kebijakan pariwisata terpadu (*integrated tourism*) adalah peningkatan infrastruktur, diikuti oleh program penguatan investasi swasta dan peningkatan tata kelola. Program yang paling tidak prioritas pada kebijakan ini adalah penguatan promosi dan *brand image*.
- Pada kebijakan pariwisata berbasis waduk (*dam base tourism policy*), program peningkatan infrastruktur, peningkatan investasi swasta dan program penguatan ICT merupakan program yang paling diunggulkan. Sedangkan pendidikan dan pelatihan merupakan program yang paling tidak diunggulkan pada kebijakan ini.



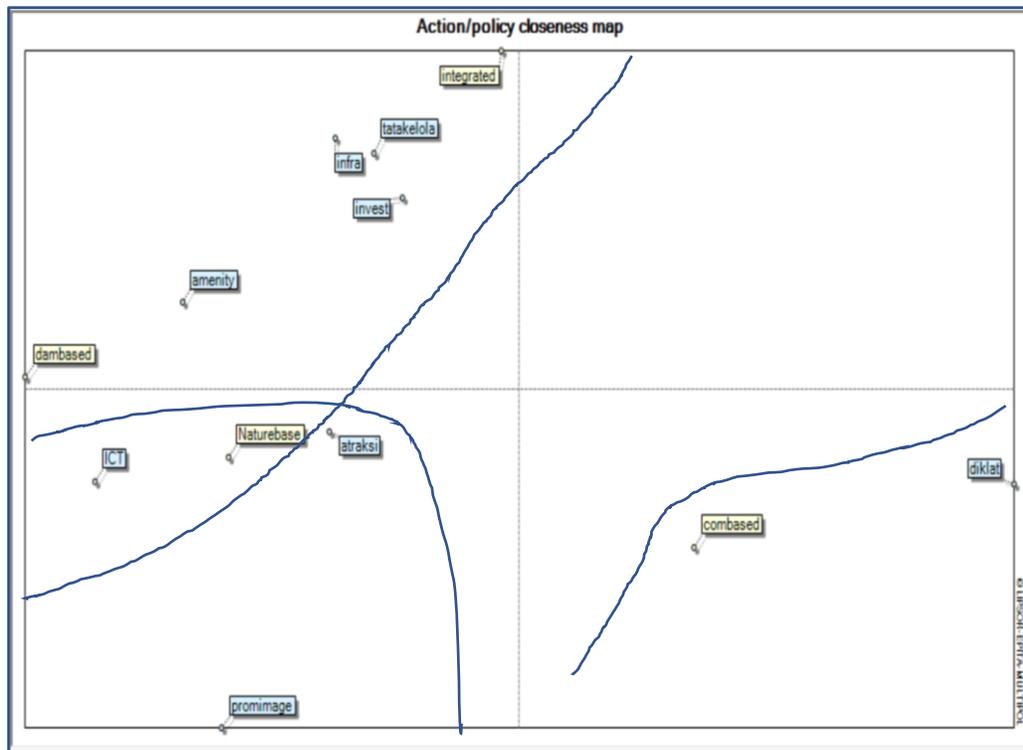
Sumber: Multipol Kedung Ombo, 2020

Gambar 11. *Profile Map* Program Terhadap Kebijakan

- Untuk kebijakan pariwisata berbasis komunitas (*community base tourism*), program yang paling baik adalah peningkatan infrastruktur, peningkatan investasi swasta dan pendidikan dan pelatihan. Sementara peningkatan promosi dan *brand image* merupakan program yang paling tidak prioritas pada kebijakan ini.
- Pada kebijakan pariwisata berbasis alam (*nature base tourism*), program penguatan infrastruktur bersama peningkatan investasi swasta merupakan program terbaik, diikuti oleh program penguatan ICT. Sedangkan program yang kurang sesuai adalah peningkatan pendidikan dan pelatihan.

Temuan pada pemetaan kinerja program terhadap kinerja kebijakan ini menguatkan hasil analisa sebelumnya yaitu bahwa program penguatan infrastruktur dan investasi swasta merupakan program yang menjadi prioritas untuk seluruh kebijakan yang akan dilaksanakan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Untuk melengkapi evaluasi keterkaitan program terhadap kebijakan, selanjutnya dapat diketahui kedekatan atau kesesuaian tiap-tiap program terhadap tiap kebijakan melalui *closeness map* (Gambar 12). Dari Gambar 12 diketahui bahwa program peningkatan infrastruktur, peningkatan investasi swasta, peningkatan tata kelola dan peningkatan ICT lebih dekat dengan kebijakan pariwisata terpadu. Sedangkan program pendidikan dan pelatihan lebih dekat dengan kebijakan pariwisata berbasis komunitas sehingga lebih sesuai untuk kebijakan ini. Sementara, program peningkatan *amenities* dan penguatan ICT lebih dekat dengan kebijakan pariwisata berbasis waduk. Sedangkan program pengembangan atraksi wisata, penguatan ICT, dan program penguatan promosi dan *brand image* lebih dekat (lebih sesuai) dengan kebijakan pariwisata berbasis alam.



Sumber: Multipol Kedung Ombo, 2020

Gambar 12. Keterkaitan Kebijakan dan Program

Gambar 12 menyajikan peta sensitivitas program, dimana sumbu (X) mengacu pada standar deviasi, sedangkan sumbu (Y) mengacu pada nilai rata-rata suatu program dan menggambarkan kinerja program berkaitan dengan kebijakan. Program yang menunjukkan deviasi standar rendah dan nilai rata-rata tinggi bekerja dengan baik untuk lebih dari satu kebijakan. Sebaliknya, program-program yang menghadirkan deviasi standar yang tinggi lebih bersifat spesifik terhadap kebijakan tertentu; sementara kinerja program tersebut untuk setiap kebijakan bergantung pada nilai rata-ratanya.

Berdasarkan proposisi tersebut, Gambar 13 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Program peningkatan penguatan infrastruktur dan peningkatan investasi swasta menunjukkan kinerja tertinggi untuk hampir semua kebijakan dengan nilai standar deviasi yang rendah.
- Rangkaian berikutnya adalah program penguatan ICT. Program ini sesuai untuk kebijakan tertentu, karena nilai rata-rata sedang dan standar deviasi rendah.



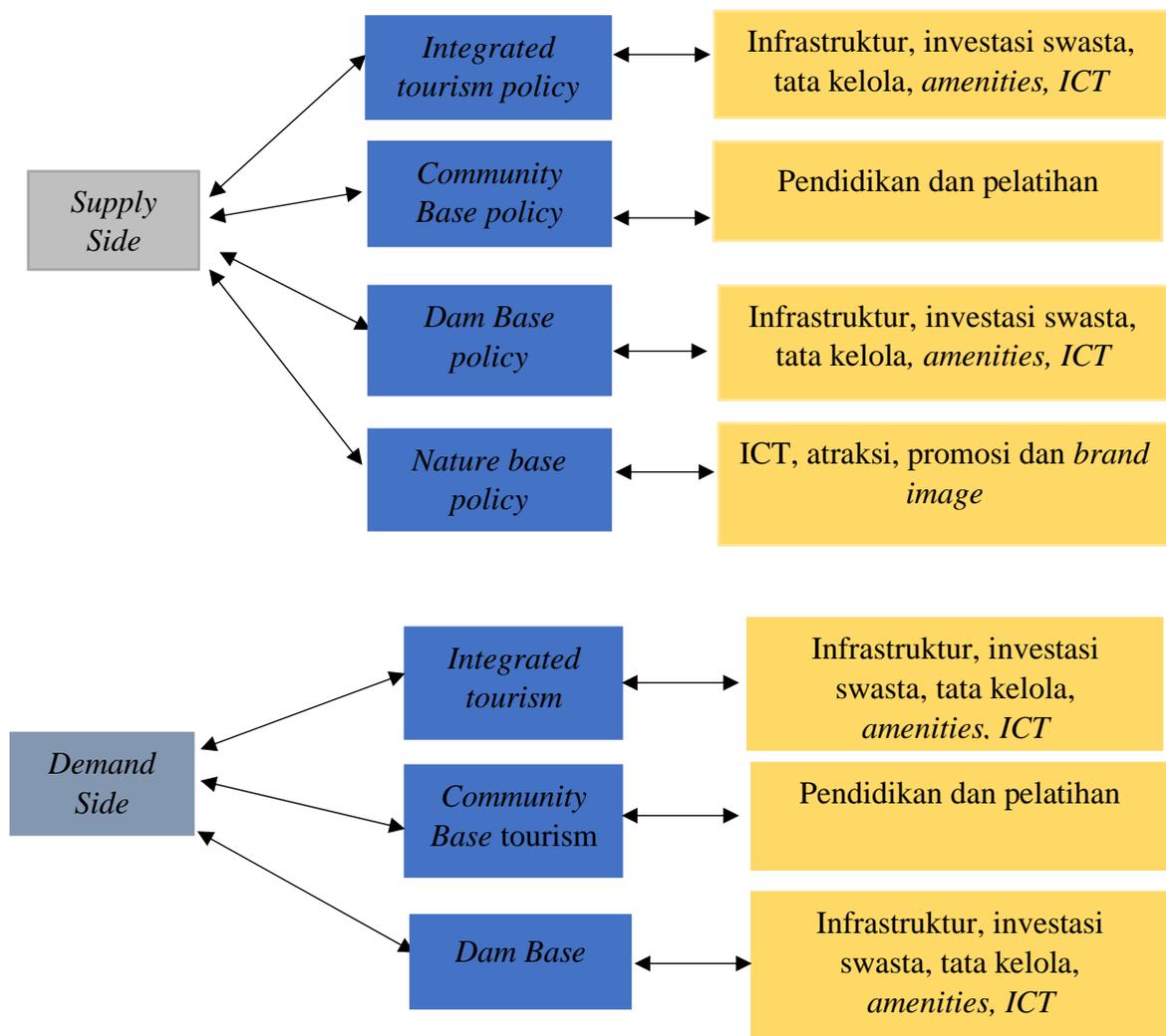
Sumber: Multipol Kedung Ombo, 2020

Gambar 13. Sensitivitas Program Terhadap Kebijakan

- Program yang mempunyai kinerja lebih rendah dibandingkan dengan program sebelumnya dengan standar deviasi yang rendah pula, merupakan program yang sesuai untuk kebijakan yang lebih spesifik, ditempati oleh program penguatan penguatan tata kelola, penguatan *amenity*, dan pengembangan atraksi wisata.
- Program penguatan promosi dan *brand image* merupakan program yang lebih rendah dalam hierarki kinerja, dengan deviasi standar terendah. Posisi ini menunjukkan bahwa program ini kurang sesuai untuk semua kebijakan atau hanya terbatas kesesuaiannya bahkan kebijakan tertentu.
- Program diklat adalah program dengan nilai rata-rata paling rendah dengan standar deviasi tinggi sehingga program hanya sesuai untuk kebijakan spesifik.

g. Opsi Jalur Kebijakan

Dari hasil evaluasi yang telah diuraikan, pada Gambar 11 disajikan kerangka kebijakan yang digariskan oleh penerapan model evaluasi multikriteria MULTIPOL dalam studi ini. Kerangka kebijakan ini menggambarkan keadaan potensial masa depan dari pengembangan kawasan wisata Kedung Ombo (skenario), bersama dengan arah kebijakan dan langkah-langkah kebijakan/program yang relevan untuk mencapai target berdasarkan ketercapaian kriteria keberhasilan. Pada Gambar 14, arah kebijakan Pj (j = 1,..., 4) dan program Act (k = 1,..., 8) disajikan dalam urutan kinerja dari yang paling tinggi hingga terendah.



Gambar 14. Jalur Kebijakan Potensial untuk Mencapai setiap Skenario Masa Depan dalam Kombinasi Kebijakan dan Program

Gambar 14 menyajikan potensi alternatif jalur-jalur kebijakan yang dapat ditempuh dalam pengembangan kawasan wisata Kedung Ombo melalui berbagai program yang sesuai dengan alternatif kebijakan dan skenario. Dari urutan tersebut, kebijakan pariwisata terpadu (*integrated tourism*) merupakan kebijakan yang terbaik dan sesuai baik untuk skenario *supply side* maupun *demand side*. Adapun program yang dapat dilakukan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini adalah peningkatan infrastruktur, peningkatan investasi swasta, penguatan tata kelola, dan peningkatan sarana dan layanan wisata (*amenities*).

Alternatif kebijakan berikutnya adalah pariwisata berbasis komunitas (*community base tourism*) dan pariwisata berbasis waduk (*dam base tourism*) yang juga sesuai untuk skenario *supply side* maupun *demand side* namun dengan proyeksi kinerja yang lebih rendah. Program unggulan yang mendukung kebijakan pariwisata berbasis komunitas adalah pendidikan dan pelatihan, sedang program prioritas yang mendukung kebijakan pariwisata berbasis waduk adalah peningkatan infrastruktur, peningkatan investasi swasta, penguatan tata kelola, peningkatan sarana dan layanan wisata (*amenities*), dan penguatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Yang membedakan pada dua alternatif skenario tersebut adalah kebijakan pariwisata berbasis alam yang hanya sesuai untuk skenario *supply side*, dengan program unggulan penguatan ICT, pengembangan atraksi, dan penguatan promosi dan *brand image*.

VII. KESIMPULAN

Pendekatan metode MULTIPOL memberikan solusi yang tepat untuk mendapatkan rumusan kebijakan, skenario dan program bagi pengembangan suatu wilayah yang memiliki banyak *stakeholder* dengan kepentingan, tujuan, tanggungjawab dan kewenangan yang berbeda. Tahapan untuk mendapatkan data, hingga mendapatkan kesimpulan yang melibatkan partisipasi semua *stakeholder*, menghasilkan kesimpulan yang dapat dipahami sekaligus sebagai keluaran rumusan bersama yang terstruktur. Dengan metode ini telah memberikan ruang bagi *stakeholder* untuk berpartisipasi dalam menghasilkan rumusan dan penilaian terhadap rencana pengembangan kawasan wisata yang dilatarbelakangi oleh kepentingan dan kendala yang kompleks, guna menghasilkan perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan wisata Kedung Ombo yang berhasil dan berkelanjutan.

Hasil evaluasi menggunakan pendekatan MULTIPOL menunjukkan bahwa pengembangan kawasan wisata Kedung Ombo yang paling baik adalah melalui kebijakan

pariwisata terpadu (*integrated tourism*) baik pada skenario *supply side* yang menekankan rencana pengembangan pada sisi penyedia dalam hal ini Pemkab, Perhutani, BBWS Pemali Juana dan masyarakat lokal, serta skenario *demand side* yang menekankan pada dorongan untuk meningkatkan kedatangan wisatawan. Kebijakan pariwisata terpadu merupakan suatu jenis pariwisata yang menentukan suatu lokasi sebagai destinasi wisata yang dikembangkan secara bersama oleh pemangku kepentingan utama kawasan Kedung Ombo, dengan mengembangkan atraksi pariwisata yang disesuaikan dengan potensi sumber daya alam, sumber daya sosial, keberadaan waduk serta pengalaman dan kompetensi seluruh *stakholder*.

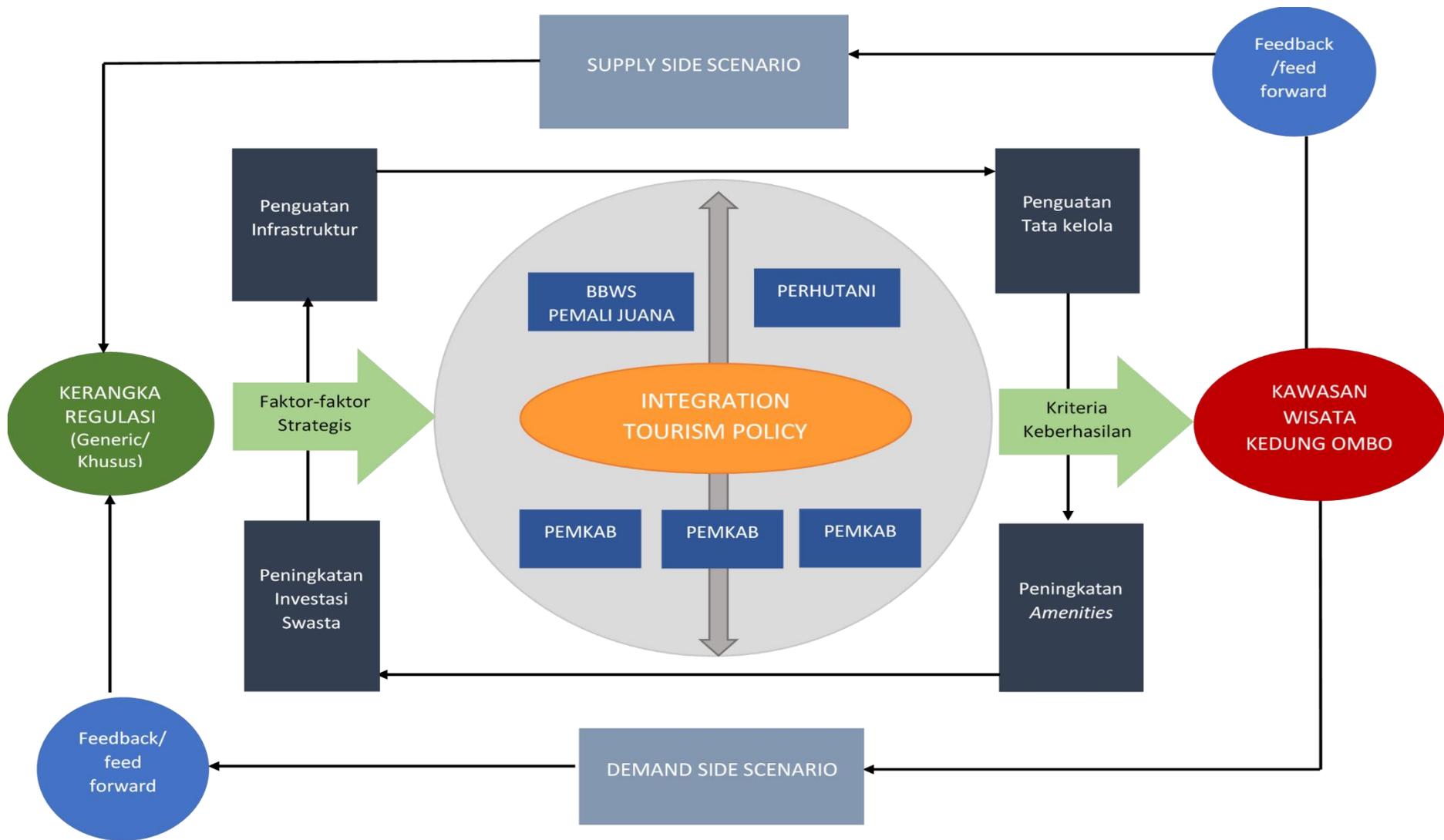
Sesuai dengan hasil penelitian, implementasi kebijakan pariwisata terpadu memerlukan dukungan program-program atau aksi tindakan yang tepat, yaitu program peningkatan infrastruktur, peningkatan investasi swasta, penguatan tata kelola, dan peningkatan sarana dan layanan wisata (*amenities*), serta penguatan ICT yang dilaksanakan secara terencana dan terpadu oleh seluruh pemangku utama dan terpadu, didukung oleh penguatan program pendidikan dan pelatihan serta pemberdayaan masyarakat. Bersamaan dengan itu perlu dilakukan proses penyiapan dan penyelesaian regulasi tentang pengelolaan hutan dan waduk untuk pariwisata yang menjadi ranah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Selain juga regulasi yang terkait dengan investasi swasta di daerah (Ariyani & Fauzi, 2019b).

Program-program tersebut merupakan program prioritas, mengingat kondisi infrastruktur di kawasan ini yang masih sangat perlu perbaikan. Dukungan investasi swasta sangat diperlukan terkait dengan keterbatasan anggaran Pemkab maupun Perhutani dan BBWS Pemali Juana dalam pengembangan pariwisata. Lokasi kawasan Kedung Ombo yang terletak di antara tiga wilayah kabupaten yang luas, sekaligus berada pada kawasan hutan yang melibatkan dua wilayah pemangku kehutanan yang berbeda, keberadaan lembaga pengelola waduk yang cukup mempunyai kewenangan yang kuat memerlukan koordinasi yang kuat untuk mengembangkan kawasan wisata yang berhasil. Dengan menerapkan kebijakan pariwisata terpadu, berbagai kekuatan, pengalaman dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak dapat dimanfaatkan secara optimal dibawah kerangka kerja kolaboratif. Dengan pariwisata yang terintegrasi maka penyelenggaraan jasa pariwisata dapat lebih optimal, karena melibatkan peran dari berbagai sektor. Pariwisata terpadu mempromosikan kegiatan pariwisata yang didukung

oleh keterkaitan sarana, prasarana, objek wisata, dan aktor dari pemerintah, swasta, dan masyarakat (Gambar 15).

Dengan ditemukannya opsi kebijakan, pilihan program dan skenario untuk pengembangan wisata di Kawasan Kedung Ombo, maka dapat digunakan dan ditindaklanjuti sebagai dasar dalam pengembangan kawasan Kedung Ombo dapat berhasil dan berkelanjutan. Dalam hal ini keberhasilannya dan keberlanjutannya ditunjukkan oleh meningkatnya pendapatan dan ekonomi wilayah, terjaganya kelestarian hutan dan fungsi utama waduk, serta meningkatkan lapangan kerja, tumbuhnya bisnis wisata baru dan meningkatnya peran aktif masyarakat.

Hasil penelitian ini tidak hanya menghasilkan konsep perencanaan pengembangan wisata kawasan Kedung Ombo sebagai daya tarik bagi wisatawan, akan tetapi lebih dari itu akan memberikan manfaat bagi pihak yang terlibat seperti pemerintah Daerah, Perhutani, BBWS dan kelembagaan lain yang merupakan pelaku penting pada kawasan ini di masa depan (Ariyani & Umar, 2020).



Gambar 15. Skema Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Kedung Ombo

VII. MODEL PARIWISATA TERPADU DAN BERKELANJUTAN KEDUNG OMBO

Berdasarkan hasil penelitian terhadap potensi pariwisata di Kawasan Waduk Kedung Ombo yang telah dilaksanakan pada tahun 2018-2020, maka sebagai kesimpulan akhir dari penelitian ini, berikut disajikan model pengembangannya yang berbasis pada aspek kelembagaan yang disebut sebagai “**Model Pariwisata Terpadu dan Berkelanjutan Kedung Ombo**. Model ini diberi nama **KOISTOUR** (*Kedung Ombo Integrated Sustainable Tourism*) yang disajikan pada Gambar 16.

Model Pariwisata Terpadu dan Berkelanjutan Kedung Ombo adalah model pengembangan kawasan wisata Kedung Ombo yang didasarkan pada konsep pariwisata terpadu dan konsep pariwisata berkelanjutan, yang menekankan pada pengelolaan dan pengembangan pariwisata yang menjaga keutuhan alam, ekonomi, dan sosial, serta menjamin pemeliharaan sumber daya alam dan budaya. Model ini menjelaskan keterpaduan antara 4 (empat) pilar strategis dan program-program untuk menghasilkan manfaat dan mengantisipasi resiko atas dikembangkannya pariwisata Kedung Ombo di masa yang akan datang. Keempat pilar tersebut meliputi: 1) Penguatan institusi, 2) Penguatan infrastruktur, 3) Penguatan pasar (*digital marketing*), dan 4) Penguatan pengetahuan. Adapun program-program unggulan yang tepat untuk dilaksanakan adalah: 1) peningkatan akses terhadap sumber daya sosial (*access to social resources*) melalui program-program pemberdayaan sosial (*capacity building*), 2) peningkatan akses terhadap institusi melalui pemberdayaan institusi, 3) penguatan infrastruktur melalui program penguatan sumber daya, finansial, dan ICT (*information and communication technology*), dan 4) peningkatan pengetahuan dan pasar melalui program-program pemberdayaan pasar dan pengetahuan.

Keberhasilan pengembangan kawasan wisata Kedung Ombo dalam konsep terintegrasi memerlukan dukungan dari sektor-sektor lain (jasa, pangan, transportasi, perbankan, , dll) dan instansi lain (di antaranya Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). Dukungan juga diperlukan dalam aspek ketersediaan sumber daya, jasa lingkungan dan regulasi. Mengingat luasnya ruang lingkup aktivitas pengembangan pariwisata di kawasan ini, maka diperlukan kerjasama yang kuat antar daerah (Kabupaten Grobogan, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen) dan Perhutani (KPH Juwangi dan KPH Gundih). Sebagai wujud dukungan dan keterlibatan dari pihak swasta, masyarakat, perguruan tinggi dan pemerintah, maka perlu dibentuk lembaga multipihak yang mewakili pilar-pilar kekuatan dalam usaha pembangunan tersebut secara terpadu yakni unit usaha swasta, masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat (LMS), Perguruan Tinggi dan pemerintah.



Gambar 16. Model Pariwisata Terpadu dan Berkelanjutan Kedung Ombo

VIII. ROADMAP IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN

Untuk mendukung implementasi hasil penelitian, maka berikut disajikan *road map* (tahapan) proses pelaksanaan pengembangan kawasan wisata Kedung Ombo berdasarkan

kerangka kebijakan pariwisata terpadu sebagai berikut (Gambar 17). Agar *road map* dapat dilakukan secara optimal, maka sebagai pendukung pada aspek kelembagaan perlu dibentuk lembaga khusus sebagai lembaga koordinator yang terdiri dari perwakilan seluruh *stakeholders* termasuk perwakilan dari Provinsi Jawa Tengah untuk menjamin terjadinya koordinasi dan sinkronisasi antar berbagai kepentingan.

PERUMUMUSAN PROFIL DAN ANALISIS DASAR KAWASAN PARIWISATA

Kerangka hukum dan otoritas perencanaan

Identifikasi otoritas perencanaan

- Evaluasi kerangka regulasi
- Review dan penilaian rencana tata ruang, rencana pembangunan wilayah dan sektoral

Informasi yang tersedia sekarang

- Penggunaan lahan, ekonomi, lingkungan, sosial budaya, dan kelembagaan
- Infrastruktur dan layanan termasuk fasilitas pariwisata
- Perencanaan tata ruang, RTRW tingkat kabupaten, propinsi
- Rencana induk sektoral: persediaan air, pengelolaan sampah dan supply listrik (*power supply*), rencana pengelolaan lingkungan dan sosial (AMDAL)

Analisis permintaan dan potensi pasar wisatawan

Analisis dasar penyediaan infrastruktur dan layanan (*amenities*)

PENILAIAN LEBIH LANJUT TENTANG KAWASAN WISATA KEDUNG OMBO

Proyeksi pertumbuhan

- Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan wilayah
- pertumbuhan wisatawan dan permintaan bisnis pariwisata baru
- Potensi pertumbuhan kawasan

Artikulasi peluang dan kendala

- Menafsirkan data dasar dengan kebijakan pengaman bank dunia untuk mengembangkan peta peluang dan kendala
- penyediaan infrastruktur dan layanan pendukung pariwisata

FORMULASI SASARAN DAN SKENARIO

Persiapan proyeksi pertumbuhan dan standar perencanaan yang berdedikasi

- Proyeksi populasi, tenaga kerja, sektor ekonomi lokal
- Analisis derivasi pasar dan penilaian permintaan
- Penilaian perencanaan infrastruktur yang dibutuhkan di masa depan
- Identifikasi kawasan strategis masa depan yang ditetapkan oleh pemerintah

Rumusan alternatif skenario pembangunan spasial

- Identifikasi luasan tanah yang diperlukan
- Identifikasi keluhan terhadap permintaan tanah, sumber daya alam dan infrastruktur
- Identifikasi intervensi strategik yang diperlukan
- Identifikasi peluang secara berkelompok per wilayah

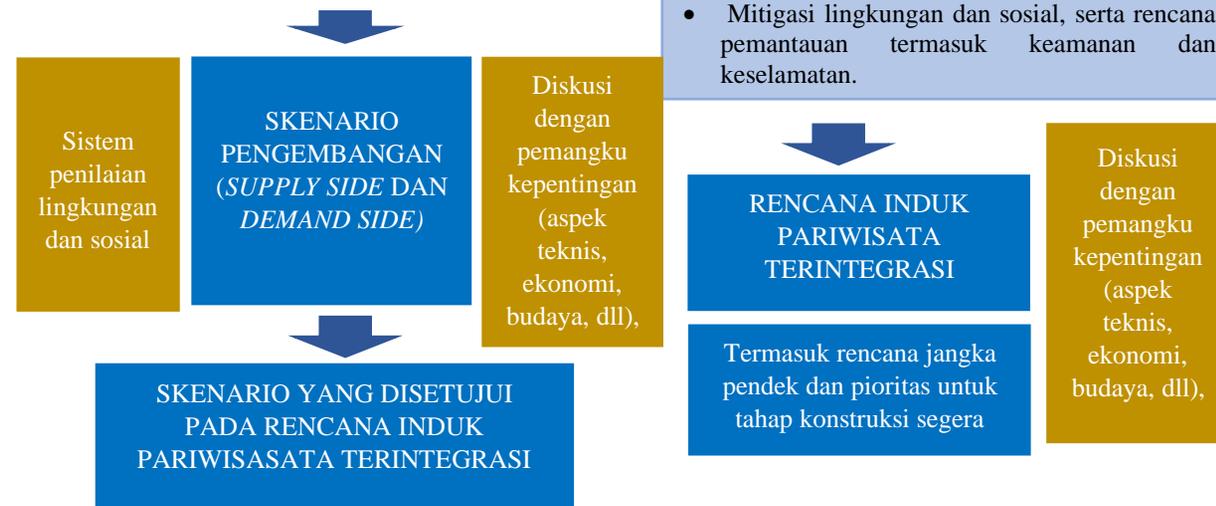
PERUMUSAN RENCANA INDUK TERINTEGRASI

Tahap persiapan rencana induk terintegrasi

- Konsolidasi skenario pembangunan yang disetujui
- Pentahapan, pengintegrasian, dan perkiraan biaya infrastruktur, layanan, fasilitas pariwisata, dan rencana pengembangan kapasitas
- Penyusunan daftar investasi infrastruktur dan layanan yang mendesak
- Prioritasi rencana pembangunan
- Pembahasan dengan instansi pemerintah terkait

Persiapan program pengembangan kapasitas

- Evaluasi peran, tanggung jawab, dan komitmen pemangku kepentingan
- Evaluasi kapasitas manajemen kelembagaan
- Pemberdayaan masyarakat dan pengelola dana
- Mitigasi lingkungan dan sosial, serta rencana pemantauan termasuk keamanan dan keselamatan.



Gambar 17. Roadmap Implementasi Pengembangan Kawasan Wisata Terintegrasi Kedung Ombo

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D. (2003). Root causes: a historical approach to assesseing the role of institutions in economic development. *Finance & Development, June 2003*. Retrieved from <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2003/06/pdf/Acemoglu.pdf>
- Ariyani, N. (2016). *Model Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan: Studi pada Program Pngentasan Kemiskinan Pemerintah, Zakat dan CSR*. IPB.
- Ariyani, N., & Fauzi, A. (2019a). Analisis Tipologi Variabel Strategis pada Pengembangan Kawasan Ekowisata Kedung Ombo. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan, 7*(3), 196–207. <https://doi.org/10.14710/jwl.7.3.196-207>
- Ariyani, N., & Fauzi, A. (2019b). Analysis of Strategic Variables for Ecotourism Development; an Application of Micmac. *South Asian Journal of Social Studies and Economics, 3*(3), 1–12. <https://doi.org/10.9734/SAJSSE/2019/v3i3330107>
- Ariyani, N., Fauzi, A., & Umar, F. (2020). Model hubungan aktor pemangku kepentingan dalam pengembangan potensi pariwisata Kedung Ombo. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 23*(2), 357–378. <https://doi.org/10.24914/jeb.v23i2.3420>
- Ariyani, N., & Umar, F. (2020). Typology of Stakeholders in Perspective of Sustainable Tourism Development Use Mactor Method, *3*(4), 20–37. <https://doi.org/10.22158/uspa.v3n4p20>
- Cawley, M., & Gillmor, D. A. (2008). Integrated rural tourism:. Concepts and Practice. *Annals of Tourism Research, 35*(2), 316–337. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2007.07.011>
- Faundez, J. (2016). Douglass North’s Theory of Institutions: Lessons for Law and Development. *Hague Journal on the Rule of Law, 8*(2), 373–419. <https://doi.org/10.1007/s40803-016-0028-8>
- Fauzi, A. (2019). *Teknik Analisis Keberlanjutan* (1st ed.). Jakarta: Gramedia.
- Hall, C. M., & Jenkins, J. (2008). Tourism and Public Policy. *A Companion to Tourism, 12*(1), 523–540. <https://doi.org/10.1002/9780470752272.ch42>
- Harrison, D. (2015). Development theory and tourism in developing countries: What has theory ever done for US? *International Journal of Asia-Pacific Studies, 11*, 53–82.
- Hazami, A. (2018). *Hampir Setahun Wisata Waduk Kedungombo Ditutup, Ini Alasannya*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4094264/hampir-setahun-wisata-waduk-kedungombo-ditutup-ini-alasannya>
- Hemaphan, P. (2017). ◦ Determinant of Stakeholder Participation Towards Sustainable Tourism

- Development: An Empirical Study Of Active Beach Destinations In Thailand. *Sripatum Review of Humanities and Social Sciences*, 17(1), 103–114. Retrieved from <https://so05.tci-thaijo.org/index.php/spurhs/article/view/113155%0A>
- Hodgson, G. M. (2006). What are institutions? *Journal of Economic Issues*, 40(1), 1–25. <https://doi.org/10.1080/00213624.2006.11506879>
- Kisi, N. (2019). A Strategic Approach to Sustainable Tourism Development Using the A’WOT Hybrid Method: A Case Study of Zonguldak, Turkey. *Sustainability (Switzerland)*, 11(4). <https://doi.org/10.3390/su11040964>
- Lisi, F. A., & Esposito, F. (2015). An AI application to integrated tourism planning. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 9336 LNCS, 246–259. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24309-2_19
- Moore Rowland, Mott McDonald, P. S. P. U. (2019). *Integrated Tourism Master Plan for Borobudur – Yogyakarta - Prambanan*. Retrieved from [http://p3tb.pu.go.id/uploads_file/20191231041302.Draft Baseline Analysis Report October 2019.pdf](http://p3tb.pu.go.id/uploads_file/20191231041302.Draft%20Baseline%20Analysis%20Report%20October%202019.pdf)
- Nasrudin, M. (2017). *Pemanfaatan Objek Wisata Waduk Kedung Ombo Sebagai Sumber Belajar Outdoor Study Mata Pelajaran Geografi Pada Siswa Kelas X Ips Di Sma Negeri 1 Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2017*. Retrieved from <http://lib.unnes.ac.id/30281/1/3201413039.pdf>
- Ngatwanto. (2018). “The Freshwater world” *Waduk Kedung Ombo Sebagai Pusat Wista Edukasi Ekosistem Air Tawar Dengan Pendekatan Neo Vernacular Design*. Retrieved from [http://eprints.ums.ac.id/68384/10/NASKAH PUBLIKASI.pdf](http://eprints.ums.ac.id/68384/10/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf)
- Postma, A., & Schmuecker, D. (2017). Understanding and overcoming negative impacts of tourism in city destinations: conceptual model and strategic framework. *Journal of Tourism Futures*, 3(2), 144–156. <https://doi.org/10.1108/JTF-04-2017-0022>
- Puiu, N., & Ovidiu, T. M. (2008). The relationship between the integrated tourism development of a region and the respective local communities of Romania. A moral approach. *Amfiteatru Economic*, 10(23), 41–45.
- Reza, I. F. (2019). Integrated Tourism As a Way to Gain More Tourists to Indonesia, (February). <https://doi.org/10.2991/eropa-18.2019.13>

- Sekarwangi, A. . (2020). *Kedung Ombo, Saksi Bisu Mega Proyek dan Simbol Cinta*. Retrieved from <https://bisniswisata.co.id/kedung-ombo-saksi-bisu-mega-proyek-dan-simbol-cinta/>
- Siti-Nabiha, A. K., & Md Saad, N. H. (2015). Tourism planning and stakeholders' engagement: The case of Penang Island. *Problems and Perspectives in Management*, 13(2), 269–276.
- Stratigea, A. (2013). Participatory policy making in foresight studies at the regional level: A methodological approach. *Regional Science Inquiry*, 5(1), 145–161.
- Suardana, I., W. (2016). Analisis Kebijakan Pengembangan Pariwisata. *ResearchGate*, March, 1–26. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/301514282>
- Syahriar, G. H. (2015). Modal Sosial Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Pariwisata Di Obyek Wisata Colo Kabupaten Kudus, 76.
- Velasquez, G. G. (2014). Stakeholders, ecotourism and sustainable development: The case of Bonito, Mato Grosso do Sul state, Brasil. *Conselho Editorial/ Editorial Board*.
- Yustika, E. (2012). *Ekonomi Kelembagaan Paradigma, Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga.
- Acemoglu, D. (2003). Root causes: a historical approach to assesseing the role of institutions in economic development. *Finance & Development*, June 2003. Retrieved from <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2003/06/pdf/Acemoglu.pdf>
- Ariyani, N. (2016). *Model Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan: Studi pada Program Pengentasan Kemiskinan Pemerintah, Zakat dan CSR*. IPB.
- Ariyani, N., & Fauzi, A. (2019a). Analisis Tipologi Variabel Strategis pada Pengembangan Kawasan Ekowisata Kedung Ombo. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 7(3), 196–207. <https://doi.org/10.14710/jwl.7.3.196-207>
- Ariyani, N., & Fauzi, A. (2019b). Analysis of Strategic Variables for Ecotourism Development; an Application of Micmac. *South Asian Journal of Social Studies and Economics*, 3(3), 1–12. <https://doi.org/10.9734/SAJSSE/2019/v3i330107>
- Ariyani, N., Fauzi, A., & Umar, F. (2020). Model hubungan aktor pemangku kepentingan dalam pengembangan potensi pariwisata Kedung Ombo. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23(2), 357–378. <https://doi.org/10.24914/jeb.v23i2.3420>
- Ariyani, N., & Umar, F. (2020). Typology of Stakeholders in Perspective of Sustainable Tourism Development Use Mactor Method, 3(4), 20–37. <https://doi.org/10.22158/uspa.v3n4p20>
- Cawley, M., & Gillmor, D. A. (2008). Integrated rural tourism: Concepts and Practice. *Annals of*

- Tourism Research*, 35(2), 316–337. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2007.07.011>
- Faundez, J. (2016). Douglass North's Theory of Institutions: Lessons for Law and Development. *Hague Journal on the Rule of Law*, 8(2), 373–419. <https://doi.org/10.1007/s40803-016-0028-8>
- Fauzi, A. (2019). *Teknik Analisis Keberlanjutan* (1st ed.). Jakarta: Gramedia.
- Hall, C. M., & Jenkins, J. (2008). Tourism and Public Policy. *A Companion to Tourism*, 12(1), 523–540. <https://doi.org/10.1002/9780470752272.ch42>
- Harrison, D. (2015). Development theory and tourism in developing countries: What has theory ever done for US? *International Journal of Asia-Pacific Studies*, 11, 53–82.
- Hazami, A. (2018). *Hampir Setahun Wisata Waduk Kedungombo Ditutup, Ini Alasannya*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4094264/hampir-setahun-wisata-waduk-kedungombo-ditutup-ini-alasannya>
- Hemaphan, P. (2017). ◊ Determinant of Stakeholder Participation Towards Sustainable Tourism Development: An Empirical Study Of Active Beach Destinations In Thailand. *Sripatum Review of Humanities and Social Sciences*, 17(1), 103–114. Retrieved from <https://so05.tci-thaijo.org/index.php/spurhs/article/view/113155%0A>
- Hodgson, G. M. (2006). What are institutions? *Journal of Economic Issues*, 40(1), 1–25. <https://doi.org/10.1080/00213624.2006.11506879>
- Kisi, N. (2019). A Strategic Approach to Sustainable Tourism Development Using the A'WOT Hybrid Method: A Case Study of Zonguldak, Turkey. *Sustainability (Switzerland)*, 11(4). <https://doi.org/10.3390/su11040964>
- Lisi, F. A., & Esposito, F. (2015). An AI application to integrated tourism planning. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 9336 LNCS, 246–259. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24309-2_19
- Moore Rowland, Mott McDonald, P. S. P. U. (2019). *Integrated Tourism Master Plan for Borobudur – Yogyakarta - Prambanan*. Retrieved from [http://p3tb.pu.go.id/uploads_file/20191231041302.Draft Baseline Analysis Report October 2019.pdf](http://p3tb.pu.go.id/uploads_file/20191231041302.Draft%20Baseline%20Analysis%20Report%20October%202019.pdf)
- Nasrudin, M. (2017). *Pemanfaatan Objek Wisata Waduk Kedung Ombo Sebagai Sumber Belajar Outdoor Study Mata Pelajaran Geografi Pada Siswa Kelas X Ips Di Sma Negeri 1 Godong*

- Kabupaten Grobogan Tahun 2017*. Retrieved from <http://lib.unnes.ac.id/30281/1/3201413039.pdf>
- Ngatwanto. (2018). “*The Freshwater world*” *Waduk Kedung Ombo Sebagai Pusat Wista Edukasi Ekosistem Air Tawar Dengan Pendekatan Neo Vernacular Design*. Retrieved from http://eprints.ums.ac.id/68384/10/NASKAH_PUBLIKASI.pdf
- Postma, A., & Schmuecker, D. (2017). Understanding and overcoming negative impacts of tourism in city destinations: conceptual model and strategic framework. *Journal of Tourism Futures*, 3(2), 144–156. <https://doi.org/10.1108/JTF-04-2017-0022>
- Puiu, N., & Ovidiu, T. M. (2008). The relationship between the integrated tourism development of a region and the respective local communities of Romania. A moral approach. *Amfiteatru Economic*, 10(23), 41–45.
- Reza, I. F. (2019). Integrated Tourism As a Way to Gain More Tourists to Indonesia, (February). <https://doi.org/10.2991/eropa-18.2019.13>
- Sekarwangi, A. . (2020). *Kedung Ombo, Saksi Bisu Mega Proyek dan Simbol Cinta*. Retrieved from <https://bisniswisata.co.id/kedung-ombo-saksi-bisu-mega-proyek-dan-simbol-cinta/>
- Siti-Nabiha, A. K., & Md Saad, N. H. (2015). Tourism planning and stakeholders’ engagement: The case of Penang Island. *Problems and Perspectives in Management*, 13(2), 269–276.
- Stratigea, A. (2013). Participatory policy making in foresight studies at the regional level: A methodological approach. *Regional Science Inquiry*, 5(1), 145–161.
- Suardana, I., W. (2016). Analisis Kebijakan Pengembangan Pariwisata. *ResearchGate*, March, 1–26. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/301514282>
- Syahriar, G. H. (2015). Modal Sosial Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Pariwisata Di Obyek Wisata Colo Kabupaten Kudus, 76.
- Velasquez, G. G. (2014). Stakeholders, ecotourism and sustainable development: The case of Bonito, Mato Grosso do Sul state, Brasil. *Conselho Editorial/ Editorial Board*.
- Yustika, E. (2012). *Ekonomi Kelembagaan Paradigma, Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga.